



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 18 TAHUN 2001**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN
KOTA BATAM TAHUN 2001 - 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban kepada Daerah, dinyatakan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas Rencana Strategis Pembangunan Kota Batam perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Permerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Batam Tahun 2001 - 2005.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BATAM TAHUN 2001 - 2005.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Pembangunan Kota Batam Tahun 2001 – 2005 adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah Kota Batam serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan bagi setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 2

Agar Rencana Strategis Pembangunan Kota Batam Tahun 2001 – 2005 ini dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh sebagaimana tertuang didalam visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada Pola Dasar Pembangunan Kota Batam, maka Rencana Strategis Pembangunan Kota Batam Tahun 2001 – 2005 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan.
- b. Bab II Proyeksi Pertumbuhan dan Kendala.
- c. Bab III Visi dan Misi serta Arah Kebijakan dan faktor-faktor Penentu Keberhasilan.
- d. Bab IV Program dan Prioritas Lima Tahunan Daerah.
- e. Bab V Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.
- f. Bab VI Matrik Daftar Indikasi Program dan Kegiatan Daerah.
- g. Bab VII Penutup.

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Rencana Strategis Kota Batam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2001 – 2005 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dana dari partisipasi masyarakat dan investasi pihak swasta serta sumber-sumber pembiayaan lain yang syah.

Pasal 5

Penilaian pertanggungjawaban Walikota dalam melaksanakan amanat Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2001 – 2005 adalah meliputi kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, Peraturan Daerah yang sudah disyahkan dan kemampuan APBD Kota Batam yang tersedia dengan senantiasa memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dan aspirasi masyarakat.

Pasal 6

Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2001 – 2005 dapat ditinjau kembali sekali dalam setahun, dengan mengacu kepada Pola Dasar Pembangunan Kota Batam Tahun Anggaran 2001 – 2005 guna memberikan pedoman penyusunan rencana Pembangunan Daerah berikutnya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Batam.

Pasal 8

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 12 Nopember 2001

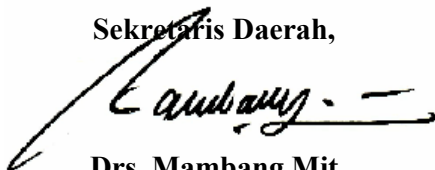
WALIKOTA BATAM,



NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 Nopember 2001

Sekretaris Daerah,



Drs. Mambang Mit
Pembina Tk.I, Nip. 0700040465

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 19 SERI C

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Umum

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*publik participation*), pemerataan dan keadilan (*equity and equality*), serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian maka terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*publik*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah sesuai dengan misi di atas, diharapkan pemerintah kota memiliki keleluasaan dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pembangunan kota melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin melibatkan peran DPRD dan masyarakatnya, oleh karena pada era demokratisasi ini, masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada di DPRD akan mengikuti dari dekat dan secara langsung sejauh mana pemerintah kota melalui walikotanya sebagai pemimpin wilayah mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat yang telah memilihnya. Pada saat yang sama, keputusan politik untuk memperluas otonomi daerah menuntut pemerintah kota agar sanggup menyusun strategi pembangunan secara komprehensif, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan norma dan kaidah yang ada dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam rangka menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk itulah dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, dibutuhkan adanya strategi pembangunan Kota Batam yang mampu menjawab dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, pemerintahan, dan lingkungan sosial serta fisik yang secara komprehensif dengan melibatkan secara aktif “tiga pilar dasar” dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

1. Pemerintah kota
2. Dunia usaha
3. Masyarakat.

Pemerintah Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999 secara yuridis formal telah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menyelenggarakan berbagai fungsi dan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka menjalankan roda pemerintahan maupun dalam rangka pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 serta kewenangan lainnya yang tidak tercakup atau tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000.

Dunia usaha di Kota Batam telah berkembang sangat pesat sekali, sehingga terbukti menjadikan Kota Batam sebagai salah satu kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang tertinggi baik di Propinsi Riau maupun di Indonesia. Hal ini adalah merupakan asset pembangunan yang bernilai strategis bagi upaya perwujudan keberlanjutan pembangunan pada masa mendatang.

Kondisi tersebut di atas, telah menjadikan masyarakat Kota Batam pada dewasa ini semakin banyak menuntut (*demanding*) kepada pemerintah kota untuk segera memanfaatkan berbagai momentum pembangunan yang telah mampu diletakkan pada masa lalu dengan lebih memberikan fokus perhatian pada berbagai permasalahan yang cukup dilematis dan tidak mampu diselesaikan secara tuntas pada masa lalu serta agar lebih responsif lagi terhadap berbagai perubahan yang terjadi secara cepat pada masa beberapa tahun terakhir ini sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi di seluruh Indonesia.

Guna merespon tuntutan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks tersebut, pemerintah kota Batam harus memiliki sistem manajemen yang handal. Hal tersebut sangat penting oleh karena permasalahan umum yang terjadi selama ini adalah rendahnya kualitas manajemen pemerintahan kota sehingga menjadikan rendahnya kualitas pelayanan publik sebagai *out come* dari sebuah kebijakan yang dihasilkan, anggaran publik dalam bentuk APBD yang kurang efisien dan efektif, dan kinerja sektor publik yang masih banyak mengecewakan masyarakat dan dunia usaha oleh karena kurangnya konsistensi dan implikasi positif serta adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, maka pemerintah Kota Batam bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha, secara bahu membahu harus dapat melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan kota Batam secara berencana, bertahap dan berkelanjutan, serta mampu menunjukkan hasil yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh komponen yang ada di Kota Batam itu sendiri secara adil, merata, dan proporsional.

Melalui perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat guna, sangat diharapkan kepada pemerintah Kota Batam selaku manager pembangunan untuk mampu mengembangkan potensi daerah, khususnya yang berada di daerah *hinterland* agar dapat bersinergi dan setara dengan daerah *mainland* yang telah berkembang secara pesat, meningkatkan daya saing daerah sehingga unggul, mampu mengatasi berbagai permasalahan baik sosial, ekonomi, politik, dan keamanan dan ketertiban yang akan dapat memperlancar proses pembangunan kota yang berkelanjutan, mempercepat upaya *recovery*/pemulihan ekonomi, serta mewujudkan kembali kondisi yang kondusif bagi dunia usaha.

Untuk itu penyusunan rencana strategis pembangunan ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Batam agar dapat disejajarkan dengan kemajuan yang telah dicapai di bidang kemasyarakatan dan pembangunan di era reformasi ini, yang menuntut kesiapan dari perangkat pembangunan untuk menyusun suatu kerangka, kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang lebih berkualitas pada perodesasi pembangunan berikutnya.

Strategi pembangunan yang dilaksanakan harus berpedoman pada prinsip-prinsip kesemestaan, partisipasi rakyat, keseimbangan, kontinuitas, pendekatan kesisteman, mengandalkan kekuatan sendiri, kejelasan strategi dasar, skala prioritas, kelestarian ekologi dan pemerataan yang disertai pertumbuhan, serta mengacu pada visi serta misi Kota Batam sendiri.

Sangat disadari bahwa kemampuan pemerintah Kota Batam dalam bidang-bidang strategis rendah sebagai akibat dari proses belajar yang terhambat, penumpukan kreativitas dan penyempitan inisiatif yang selama ini berlangsung. Penerapan sistem pemerintahan yang sentralistis dan dominasi pemerintah pusat yang berlebihan pada masa lalu telah meningkatkan ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Dengan kondisi seperti ini disatu sisi pemerintah kota dituntut untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai prasyarat bagi perwujudan *clean government*.

Di sisi lain, kurang tanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, ketidak selarasaan antara kebijakan dan implementasinya pada berbagai bidang pembangunan dan pemerintahan merupakan penyebab melemahnya kemampuan pemerintah kota dalam melaksanakan tugas secara otonom, kurang terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat, ketidak merataan pertumbuhan ekonomi, ketidak berdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan di berbagai daerah terutama di daerah *mainland*.

Dalam upaya mewujudkan Kota Batam sebagai pusat industri, pusat perdagangan dan pelayanan jasa yang handal sehingga dapat menjadi bandar dunia yang madani, tampaknya Batam harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan daerah dan kawasan lainnya. Batam harus menghadapinya dengan persiapan-persiapan yang selaras dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, manajemen dan sistem kelembagaan, yang diarahkan pada peningkatan daya saing ekonomi.

Berbagai upaya pembangunan telah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Kemajuan pembangunan di berbagai bidang telah dicapai dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun, dalam mencermati kondisi, potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki, mengharuskan seluruh masyarakat bersama pemerintah Kota Batam harus mengambil langkah-langkah untuk terus berupaya menata ulang berbagai bentuk kebijaksanaan agar lebih diarahkan pada upaya pemulihan situasi dan kondisi atas dasar rujukan yang disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah, duna usaha dan masyarakat itu sendiri.

Seluruh komponen pembangunan di Batam harus memiliki kesamaan visi, misi dan strategi pembangunan dalam melangkah ke depan yang tidak saja memiliki muatan-muatan pembangunan masa depan, tetapi juga memiliki cakupan konseptual dalam merakit rencana-rencana pembangunan kota, dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan Kota Batam harus dapat memanfaatkan dan mengoptimisasikan semua potensi yang ada, terutama potensi yang dapat meningkatkan aktifitas dan dinamika pembangunan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

1. Menjabarkan visi, misi, dan strategi pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2001 – 2005 ke dalam bentuk program-program pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi, permasalahan, dan potensi yang ada.
2. Memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi secara umum Kota Batam pada masa lima tahun mendatang sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Batam.
3. Sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan daerah yang dapat dijadikan acuan utama bagi seluruh dinas/instansi dan masyarakat Kota Batam dalam menyusun program-program pembangunan selama lima tahun ke depan.

1.2.2 Sasaran

1. Tersusunnya rencana strategi untuk mewujudkan visi dan misi Kota Batam melalui berbagai kegiatan pembangunan daerah.
2. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang terpadu, diseluruh Kota Batam.
3. Pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah.

1.3 Landasan

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kota Batam disusun berlandaskan pada :

1. Pancasila sebagai landasan Idiil.
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.
3. Garis-Garis Besar Haluan Negara, Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 beserta aturan pelaksanaannya, Undang – Undang No. 25 Tahun 1999, Undang – Undang No. 53 Tahun 1999, Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Kota Batam sebagai landasan Operasional.

1.3 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kota Batam Tahun 2001 – 2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Proyeksi Pertumbuhan dan Kendala
Bab III	:	Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
Bab IV	:	Program dan Kegiatan Prioritas Lima Tahunan Daerah
Bab V	:	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Bab VI	:	Matriks
Bab VII	:	Penutup

Disamping itu diuraikan lebih terinci Perencanaan Strategis kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun (PS-1 dan PS-2) dan kerangka Pengukuran Kinerja (PK) serta kerangka Evaluasi Kinerja kegiatan (EK-1); Evaluasi Kinerja Program (EK-2); Evaluasi Kinerja Kebijakan (EK-3) yang disajikan pada lampiran tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Batam Tahun 2001 – 2005.

Bab 2 **Proyeksi Pertumbuhan** **dan Kendala**

2.1 PDRB dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 PDRB Tahun 1993 - 2000

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam selama tujuh tahun terakhir (1993 – 2000) rata-rata sebesar 11,69 persen pertahunnya. Pertumbuhan tersebut adalah yang tertinggi di Indonesia, apalagi selama masa krisis ekonomi (1997 – 2000) jika perekonomian nasional rata-rata pertahun terkontraksi sebesar 2,82 persen, Batam justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,71 persen pertahunnya. Kondisi ini dapat dimaklumi bahwa pilar utama penyangga perekonomian Kota Batam adalah industri dengan prioritas pada industri pengolahan untuk keperluan reekspor serta sektor perdagangan dan jasa.

Tabel 2.1 : PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993 – 2000 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian	10,37	9,71	9,81	14,75	17,92	27,46	29,47	31,14
2. Pertambangan & Galian	20,36	22,44	24,65	18,98	23,76	14,56	15,00	15,89
3. Industri	771,64	933,76	1.141,90	1.376,14	1.577,90	1.731,98	1.924,94	2.061,15
4. Listrik, Gas & Air Bersih	14,16	14,73	15,53	21,04	27,03	30,20	36,03	40,26
5. Bangunan	64,39	77,70	89,12	102,67	108,51	78,14	79,97	85,14
6. Perdagangan, Hotel & Rest.	212,98	233,75	254,68	299,407	313,24	226,39	234,44	248,95
7. Pengangkutan & Kom.	61,68	69,37	78,86	90,45	101,34	103,65	102,83	108,52
8. Keuangan	113,70	121,97	130,26	139,26	172,75	200,77	144,30	175,17
9. Jasa-Jasa	31,94	33,60	36,36	40,78	46,00	48,84	52,20	55,10
Jumlah	1.301,22	1.517,03	1.781,17	2.103,17	2.388,44	2.461,98	2.619,17	2.821,31

Sumber : BPS Kota Batam, 2000

Jika dilihat secara sektoral selama kurun waktu 1993-2000, ternyata sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertanian yang mencapai sebesar 17,00 persen; diikuti tempat kedua sektor listrik, gas da air bersih sebesar 16,10 persen; dan ditempat ketiga sektor industri dengan pertumbuhan sebesar 15,07 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya rata-rata pertahun selama kurun waktu tersebut di atas lebih rendah disbanding pertumbuhan ekonomi rata-rata yaitu berkisar antara minus 3,49 persen hingga 8,41 persen.

Kondisi pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 1993-2000 tersebut telah menyebabkan terjadinya perubahan kontribusi/peranan yang cukup berarti dalam struktur perekonomian Kota Batam, jika peranan sektor industri yang merupakan sektor unggulan utama daerah ini pada tahun 1993 sebesar 59,30 persen, maka pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 70,21 persen. Demikian pula untuk sektor pertanian dan sektor listrik, gas dan air bersih kontribusinya telah meningkat masing-masing dari 0,80 persen dan 1,09 persen pada tahun 1993 menjadi 1,69 persen dan 1,21 persen pada tahun 2000. Sedangkan peranan/kontribusi sektor-sektor lainnya yang mengalami penurunan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 16,37 persen menjadi 11,31 persen pada tahun 2000, sektor pengangkutan dan komunikasi dari 4,74 persen pada tahun 1993 menjadi 3,61 persen pada tahun 2000, sektor keuangan, jasa persewaan dan jasa perusahaan dari 8,74 persen pada tahun 1993 menjadi 5,73 persen pada tahun 2000, sektor bangunan dari 4,95 persen pada tahun 1993 menjadi 3,24 persen pada tahun 2000, sektor pertambangan dan penggalian dari 1,57 persen pada tahun 1993 menjadi 0,79 persen pada tahun 2000 serta sektor jasa-jasa dari 2,45 persen pada tahun 1993 menjadi 2,22 persen pada tahun 2000.

Tabel 2.2 : Distribusi/Struktur Perekonomian dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi 1993 – 2000 Kota Batam (%)

Lapangan Usaha	Struktur Perekonomian (PDRB atas dasar harga berlaku)		Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per tahun (PDRB atas dasar harga konstan 1993) 1993-2000
	1993	2000	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	0,80	1,69	17,00
2. Pertambangan & Galian	1,57	0,79	-3,49
3. Industri	59,30	70,21	15,07
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,09	1,21	16,10
5. Bangunan	4,95	3,24	4,07
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	16,37	11,31	2,25
7. Pengangkutan & Komunikasi	4,74	3,61	8,41
8. Keuangan	8,74	5,73	6,37
9. Jasa-jasa	2,45	2,22	8,10
Jumlah	100,00	100,00	11,69

Sumber : Data olahan dari BPS Kota Batam, 2000

2.1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2001 – 2005

Berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro daerah ini seperti tersebut di atas, maka dalam menghadapi perkembangan ekonomi untuk masa lima tahun kedepan (2001- 2005) diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Batam meskipun akan mengalami peningkatan dibanding periode lima tahun sebelumnya perkembangannya tidak akan berbeda jauh dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Riau. Namun jika dibandingkan dengan tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Batam masih akan selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut didasarkan kepada sifat dan karakteristik perekonomian Kota Batam berbeda dengan perekonomian secara nasional ataupun daerah-daerah lainnya.

Perekonomian Kota Batam dicirikan pada pola kegiatan investasi yang lebih terfokus pada sektor industri pengolahan untuk keperluan reekspor. Namun demikian tanpa mengabaikan potensi ekonomi lainnya, maka pada masa mendatang sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih akan mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan PDRB sekalipun dalam jumlah yang kurang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Kota Batam dalam rentang waktu 2000 - 2005.

Tabel 2.3 : Perkiraan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993, Struktur Perekonomian dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam 2000 – 2005.

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Miliar Rp.)		Struktur Perekonomian (%)		Laju Pertumbuhan Ekonomi per Tahun (2000 – 2005)
	2000	2005	2000	2005	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Pertanian	31,14	54,77	1,69	1,89	11,96
2.Pertambangan & Galian	15,89	12,74	0,79	0,66	-4,32
3.Industri	2.061,15	3.303,7	70,21	71,05	9,90
4.Listrik, Gas & Air Bersih	40,26	6	1,21	1,52	14,85
5.Bangunan	85,14	80,44	3,24	3,49	11,26
6.Perdagangan, Hotel & Restoran	248,95	145,17	11,31	10,27	7,53
7.Pengangkutan & Komunikasi	108,52	357,94	3,61	3,66	10,55
	175,17	179,19	5,73	5,38	8,27
8.Keuangan	55,10	260,59	2,22	2,08	6,09
9.Jasa-jasa		74,05			
Jumlah	2.821,31	4.468,65	100,00	100,00	9,63

Selama kurun waktu 2000-2005 perekonomian Kota Batam masing-masing sektornya tumbuh positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Sehingga secara keseluruhan diperkirakan perekonomian Kota Batam akan tumbuh rata-rata per tahun sekitar 9,63 persen dengan tingkat inflasi rata-rata per tahun sekitar 11,08 persen dan ICOR sebesar 2,97. Untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan maka diperlukan investasi sebesar 4,9 trilyun rupiah selama lima tahun. Dalam proyeksi tersebut di atas diasumsikan kinerja perekonomian nasional dan global selama lima tahun mendatang akan membaik, sehingga akan berdampak positif terhadap perekonomian Batam.

Pertumbuhan yang terjadi dalam masa lima tahun tersebut tentunya akan menyebabkan terjadinya sedikit pergeseran struktur perekonomian Kota Batam. Sektor industri yang sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kota Batam, kontribusinya mengalami peningkatan dari 70,21 persen pada tahun 2000 menjadi 71,05 persen pada tahun 2005, sebaliknya sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sektor unggulan kedua kontribusinya mengalami penurunan dari 11,31 persen pada tahun 2000 menjadi 10,27 persen pada tahun 2005. Demikian juga sektor unggulan ketiga yaitu sektor keuangan, jasa persewaan dan perusahaan menurun dari 5,73 persen pada tahun 2000 menjadi 5,38 persen pada tahun 2005. Sektor-sektor lainnya yang mengalami kenaikan kontribusi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bangunan dan sektor pertanian masing-masing dari 3,61 persen, 3,24 persen dan 1,69 persen pada tahun 2000 menjadi masing-masing sebesar 3,66 persen, 3,49 persen dan 1,89 persen pada tahun 2005.

2.2 Kendala Yang Dihadapi

2.2.1 Konflik Sosial dan Kerusuhan Massa

Permasalahan utama Kota Batam adalah dampak dari Tingginya arus migrasi yang masuk oleh karena adanya “efek lampu pijar” (*electric bulb effect*) dari Kota Batam sendiri. Dampak lebih lanjutnya adalah menyangkut penyediaan berbagai fasilitas sosial, fasilitas umum, maupun fasilitas ekonomi yang dibutuhkan bagi penduduk, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, tempat berusaha, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Sebagai akibat dari ketidak seimbangan antara kebutuhan dengan percepatan pembangunan dari pada berbagai fasilitas tersebut, maka telah menjadikan saat sekarang Kota Batam menjadi semakin kurang tertib, kurang tertata dengan rapi dan baik, semrawut, kemacetan lalu lintas, dan mulai timbulnya berbagai macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang ditandai dengan semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas kejahatan pelanggaran hukum, rusaknya tata ruang kota yang telah disusun sedemikian rupa, serta terancamnya sejumlah kawasan yang diperuntukkan sebagai areal tangkapan air (*catchments area*), kawasan hijau (*green belt area*), dan sebagai kawasan budi daya lainnya.

Timbulnya berbagai bentuk kecenderungan yang sangat merugikan citra Kota Batam sebagai Pusat Perdagangan, Pusat Industri dan Daerah Tujuan Wisata, adalah lebih disebabkan oleh karena kurang adanya kebijakan antisipatif, seperti penyiapan lahan permukiman yang memadai untuk menghindari munculnya rumah-rumah liar (ruli) pada kawasan yang dilarang; perluasan pasar-pasar tradisional untuk mencegah agar pedagang kaki lima, tidak berjualan di sembarang tempat; pengembangan kawasan-kawasan baru sebagai konsentrasi kegiatan ekonomi sehingga titik konsentrasi kegiatan ekonomi akan lebih menyebar; pengadaan sistem transportasi massa yang murah, cepat, aman, dan mudah serta mampu menghubungkan dengan berbagai konsentrasi kegiatan masyarakat sehingga tidak berkembangnya kegiatan angkutan liar (gelap); serta kurangnya kesungguhan dari pihak terkait untuk menegakkan hukum terutama terhadap pelanggaran tata ruang kota.

Keberhasilan menyelenggaraan pembangunan ekonomi yang ditandai dengan kemampuan Batam dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini, ternyata telah menimbulkan kesenjangan spasial antara daerah *mainland* dengan daerah *hinterland*, kesenjangan sektoral antara sektor industri dan perdagangan dengan sektor lainnya, dan kesenjangan pendapatan (*disparitas income*) antar penduduk yang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Kesenjangan-kesenjangan tersebut disebabkan oleh karena perbedaan dalam penyediaan berbagai fasilitas pelayanan social, pelayanan umum, dan fasilitas kegiatan ekonomi.

Pergeseran nilai-nilai sosial budaya dan gaya hidup telah terjadi demikian jauh di Kota Batam, sehingga menyebabkan persaingan hidup yang semakin berat dan ketat. Kondisi ini menyebabkan telah semakin mempertajam sikap individualis dan falsafah hidup materialis masyarakat agar dapat bertaham hidup (*survive*). Apabila hal ini tidak segera diantisipasi akan dapat semakin memperberat beban sosial kota oleh karena akan semakin mempertajam dan meningkatkan berbagai bentuk gangguan sosial dan gangguan keamanan serta ketertiban, yang akan berdampak pada kondisi stabilitas ekonomi, politik, sosial-budaya, penegakkan hukum, yang pada akhirnya kurang meletakkan nilai-nilai kemanusiaan pada proporsi dan posisi yang sesungguhnya.

Dari aspek kesejahteraan sosial lainnya yang cukup menonjol ber-kembang di Kota Batam adalah masalah gelandangan, pengemis, sumbangan secara paksa oleh sejumlah organisasi masyarakat yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat dan percaloan taksi serta lapangan usaha yang sering menimbulkan konflik antara calo, pekerja dan suku yang Sampai saat sekarang belum dapat di tuntaskan secara baik.

Pluralitas budaya yang ada dalam masyarakat Kota Batam, telah pula ikut mewarnai dinamika dan sekaligus permasalahan kota menjadi semakin kompleks. Demikian pula terhadap perilaku yang sudah tidak menghormati hukum dan menjunjung tinggi hukum. Ketimpangan, kecemburuan, ketegangan dan penyakit sosial lainnya makin menggejala disamping kurangnya rasa peduli dan kesetiakawanan sosial masyarakat, serta sudah semakin berkurangnya tokoh baik formal maupun informal yang dapat dijadikan panutan dan teladan dalam berbagai hal.

Pembangunan Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib dan dinamis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Kota Batam bersama-sama dunia usaha, masyarakat dan komponen pembangunan lainnya harus dapat melaksanakan pembangunan secara berencana, bertahap, ber-kelanjutan dan terpadu agar dapat memberikan hasil yang optimal dapat dirasakan dan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Kota Batam dan sekitarnya secara bersama-sama. Sejak terjadinya krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan telah berubah menjadi krisis kepercayaan dengan puncaknya digulirkan reformasi, maka banyak tatanan kehidupan berbangsa berusaha dirubah total yang bertujuan untuk mencapai tatanan yang lebih baik lagi.

Upaya pengendalian stabilitas dan pemulihan kembali kegiatan perekonomian memerlukan stabilitas sosial. Pada gilirannya, pemulihan kembali stabilitas sosial memerlukan pembaruan sistem sosial atau reformasi berdasarkan kontrak sosial. Kontrak sosial baru itu hendaknya didasarkan pada tuntutan masyarakat yang marak dalam era reformasi dewasa ini. Kontrak sosial yang baru hendaknya dapat mewujudkan demokrasi politik berdasarkan perwakilan yang sebenarnya serta menjamin partisipasi aktif seluruh warga negara. Secara eksplisit sistem sosial baru itu harus dapat mengakui dan menjamin ke-Bhinnekaan Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai ras, suku, agama dan adat istiadatnya sendiri-sendiri. Sistem sosial baru itupun harus dapat mengoreksi distorsi serta konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi guna menjamin adanya kesamaan hak politik warga negara, otonomi daerah serta pemerataan ekonomi. Pendek kata kontrak sosial yang baru itu harus dapat mengikut sertakan dan memobilisasi potensi dari seluruh lapisan masyarakat serta menjamin keadilan maupun pemerataan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

2.2.2 Lemahnya Penegakan Hukum

Belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan secara proporsional dan profesional berdasarkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Batam, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban, hubungan fungsional, dan mekanisme kerjasama di antara keduanya. Oleh karena itu perlu diatur lagi agar lebih tegas dan jelas serta transparan tentang batas-batas yurisdiksi, *property right*, dan aturan representasi lainnya.

Peninjauan kembali terhadap produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan zaman dan reformasi, dan harus lebih mengarah pada pengaturan dan pengawasan Batam sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan wilayah administrasi Pemerintahan Kota Batam dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).

Permasalahan penegakan hukum masih belum mampu memberikan harapan rasa tertib dan aman bagi masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari situasi perkembangan Kamtibmas dan proses penegakan hukum yang belum berjalan sebagaimana kita harapkan. Kondisi Kamtibmas ber-kembang sedemikian rupa sedangkan penyelesaiannya masih mengalami hambatan yang mungkin disebabkan minimnya sarana prasarana dan kondisi wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk mempercepat proses penegakan hukum. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap hukum yang belum memadai dan jaminan perlindungan hukum terhadap rasa aman penduduk belum terlaksana sebagaimana mestinya, dan membawa pengaruh kepada proses penegakkan hukum. Salah satu sebabnya adalah keterbatasan sarana prasarana dan dana operasional.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin meningkat, sedangkan proses peradilan dalam hal-hal tertentu mengalami hambatan, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya tanggung jawab aparat penegak hukum melaksanakan ketentuan hukum dan rendahnya *political will* pemerintah dalam penegakan hukum.

Pada masa lalu masalah supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hanyalah sebagai slogan atau retorika politik belaka, malah sebaliknya hukum dan politik telah disalahgunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan elit, pelaku ekonomi dan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya masalah hukum dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah telah banyak merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Permasalahan penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada era otonomi ini sulit untuk ditegakkan. Hal ini disebabkan rusaknya moral dan mentalitas sebagian aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, yang tidak mudah untuk dihilangkan ataupun dirubah dalam rangka mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat.

Dengan terbukanya Kota Batam untuk investasi dari pihak luar maka dengan sendirinya masalah pertanahan menjadi hal yang sangat penting bagi kelanjutan pembangunan di bidang ekonomi dan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus diantisipasi dari awal untuk meng-hindari timbulnya akibat yang dapat merugikan kepentingan investasi dan masyarakat.

Kota Batam relatif lebih mudah menentukan berbagai kelembagaan strategis pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Tentu kesempatan ini dapat dimanfaatkan se-efektif mungkin dan belajar dari daerah lain dengan segala kelebihan dan kelemahannya, serta pengalaman masa lalu yang banyak merugikan masyarakat dan daerah Kota Batam sendiri. Yang jelas kekhasan Kota Batam dengan pluralitas dalam masyarakat pelabuhan, dan berada di barisan garda depan Selat Malaka, dan tempat keluar barang-barang produksi seperti produk industri, dan sekaligus pariwisatanya dengan berbagai permasalahan hukum yang lebih kompleks.

Tentu agenda lokal di era reformasi adalah mengembalikan kedaulatan hukum di tangan rakyat, dengan pemberdayaan masyarakat yang diekspresikan pada peranan sumbangan hukum, tercermin mengurangi kekuasaan negara dan pemerintah dalam penyelenggaraannya. Perhatian utama pada seluruh bidang hukum pada pembuatan (*legislation*), peradilan (*judiciary*), dan pelaksanaan (*enforcement*). Dengan kerangka itulah reformasi hukum tidak dapat dipisahkan dengan reformasi politik, sehingga untuk mewujudkan supremasi hukum dan *Good Governance* perlu dilakukan:

- a. Menumbuhkan wacana demokrasi yang tercermin dalam infrastruktur kehidupan bermasyarakat egalitarian, dan dimana - mana manusia hidup dan berinteraksi sesamanya sebagai berkesamaan derajat dan hak. Dari sana diharapkan mengarah kepada apa yang disebut dengan *civil society*.
- b. Membangun masyarakat hukum, adalah dengan mengurangi peranan kekuasaan dan pemerintah dalam penyelenggaraan hukum, dengan pemberdayaan masyarakat pada semua aspek bidang hukum, pengadilan (*judiciary*), pembuatan (*legislation*) dan pelaksanaannya (*enforcement*)
- c. Terselenggaranya hubungan hukum yang harmonis dalam masyarakat yang dapat mendukung kepentingan daerah, sebagai upaya percepatan pemulihan dan penegakan hukum untuk kelancaran pembangunan Kota Batam dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas.

2.2.3 Lambatnya Pemulihan Ekonomi Daerah

Sejak pertengahan tahun 1997, dimana terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berkembang menjadi krisis di segala bidang, krisis yang bermula dari hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan perekonomian nasional dalam menghadapi badai krisis keuangan yang juga melanda negara-negara se-kawasan, telah menyebabkan goncangnya nilai tukar rupiah. Gejolak nilai rupiah tersebut menyebabkan hutang luar negeri swasta, yang dalam jumlah besar bersifat jangka pendek dan sebagian besar sangat dipengaruhi oleh gejala nilai tukar menjadi beban yang sulit dikendalikan dan segera menghambat kelancaran roda usaha. Dampak lanjutnya adalah membengkaknya kredit macet sehingga melemahkan kinerja perbankan yang merupakan jantung pembiayaan perekonomian daerah dan nasional.

Stabilitas ekonomi makro terganggu, sektor usaha sebagian besar mengalami kemunduran dan tingkat pendapatan masyarakat merosot tajam. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun 1998 mengalami kontraksi sebesar minus 13,01 persen (1997-1998). Inflasi membumbung tinggi mencapai 77,6 persen (1998), jumlah penduduk miskin meningkat dari 9,6 persen (1996) menjadi 45,5 persen tahun 1998.

Pada awal krisis berbagai kalangan mempekirakan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis sedalam negara-negara tetangga, perkembangan yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini terjadi karena landasan ekonomi Indonesia cukup rentan terhadap gejolak. Di bidang ekonomi swasta diharapkan menjadi tumpuan penggerak ekonomi nasional, namun dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak berakar pada daya saing tetapi lebih mengandalkan pada akses untuk memperoleh kemudahan. Keadaan ini menimbulkan ketimpangan dalam standard dunia usaha yaitu sebagian besar ekonomi terpusat pada sebagian kecil masyarakat. Terpusatnya kegiatan ekonomi pada kelompok yang sesungguhnya tidak mempunyai daya saing mengakibatkan rapuhnya landasan perekonomian. Hal ini terjadi karena ketiadaan pranata dan praktek kelembagaan yang baik.

Pola distribusi pendapatan penduduk Kota Batam mengindikasikan bahwa terjadinya tingkat kemiskinan relatif yang cukup timpang yaitu pada tahun 1999, 40 persen masyarakat yang berpendapatan rendah telah menerima 19,52 persen dari jumlah pendapatan dan 40 persen penduduk yang berpenghasilan menengah menerima 51,92 persen dari jumlah pendapatan, sedangkan 20 persen penduduk yang berpenghasilan tinggi telah mengumpulkan 28,56 persen dari jumlah pendapatan tersebut.

Berubahnya pola distribusi pendapatan bukan disebabkan meningkatnya produktivitas masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi berkurangnya pendapatan masyarakat golongan berpendapatan sedang dan tinggi sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga berkurangnya tingkat produksi kedua golongan tersebut, hal ini dapat dilihat angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 yaitu sebesar 3,08 persen. Berubahnya pola distribusi pendapatan ke arah yang semakin tidak merata diperlihatkan dengan turunnya angka Indeks Gini Ratio dari 0,2146 tahun 1995 menjadi 0,3047 tahun 1999.

Dalam proses akumulasi modal yang selama ini telah berlangsung perlu dibenahi kembali, kekurangan yang perlu diperbaiki yang juga merupakan kelemahan dan kekurangan adalah :

- a. Menyangkut dengan in-efisiensi yang terjadi dalam pelaksanaan investasi. Hal ini terbukti dari nisbah tambahan investasi terhadap hasil yang diperoleh dengan investasi yang bersangkutan. Nisbah tersebut dikenal dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Selama kurun waktu 1993 - 1996 (sebelum krisis ekonomi) angka ICOR Kota Batam rata-rata hanya sebesar 1,89 dan dapat dikatakan cukup efisien, hal ini mengingat sektor unggulan ekonomi pembangunan ini adalah sektor industri (sektor sekunder), sedangkan pada periode 1997 – 2000 (disaat krisis ekonomi) ICOR Kota Batam meningkat tajam rata-rata menjadi 5,37. Dalam hal ini pada saat puncak krisis ekonomi tahun 1998 ICOR Kota Batam bahkan mencapai 9,75, kondisi makin membaik pada tahun 1999 dan 2000 masing-masing menjadi 4,83 dan 4,21. Tingginya angka ICOR yang melebihi 3,5 persen disebabkan oleh berbagai faktor teknis dan non ekonomis, yaitu terjadi pemborosan dan kerugian secara kasar yang diperkirakan sebesar 20 sampai 30 persen. Tingginya angka ICOR tersebut karena terdapat kelemahan pada perencanaan, pelaksanaan investasi dan pengawasan dan sebagian lagi disebabkan oleh sifat investasi itu sendiri yang tidak menghasilkan output atau memakan waktu yang lama.
- b. Perbandingan antara investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan investasi yang dilaksanakan oleh swasta terlalu menyolok. Dari jumlah investasi Rp 6.291,33 miliar, investasi pemerintah Rp 886,70 miliar atau sebesar 14,09 persen dari jumlah investasi dan investasi swasta Rp. 5.404,63 miliar atau 85,91 persen. Investasi pemerintah pada kenyataannya mempunyai peranan ganda yaitu disamping membangun kepentingan publik, juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang lebih adil serta berke-wajiban untuk menjaga stabilitas yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya investasi swasta bertujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal dan lebih ditekan-kkan kepada peningkatan produksi sehingga mendorong tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap besarnya jumlah investasi swasta yaitu :
 - Investasi swasta pada umumnya bertujuan mencari keuntungan, lebih menekankan biaya produksi termasuk untuk memperoleh faktor-faktor produksi dengan biaya murah seperti ganti rugi tanah yang tidak adil, menekan upah buruh di bawah minimum regional.
 - Dengan adanya kegiatan investasi seharusnya dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas, tetapi hal ini kurang dirasakan oleh masyarakat, karena tenaga kerja sering didatangkan dari daerah lain dengan alasan tidak mempunyai keterampilan, belum berpengalaman.
 - Dampak besarnya jumlah investasi swasta pada daerah *mainland*, belum menimbulkan efek rembesan (*Tricke Down Effect*) di daerah *hinterland* karena tidak mengikut sertakan masyarakat di daerah *hinterland* tersebut, seperti untuk menyerahkan sebagian kegiatan produksi kepada masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan pokok karyawan.
 - Walaupun pada lokasi kegiatan investasi terdapat sejumlah desa, namun desa-desa tersebut tidak terintegrasikan ke dalam kegiatan investasi tersebut, sehingga kegiatan investasi menjadi *in-clave* di tengah lingkungan masyarakat perdesaan setempat. Hal ini telah menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat menyolok antara karyawan perusahaan dengan masyarakat setempat.

- c. Adalah yang berkaitan dengan perbedaan antara laju pertumbuhan sektor pertanian dengan pertumbuhan sektor industri dilain pihak. Laju pertumbuhan ekonomi periode tahun 1993-2000 sebesar 11,69 persen. Akan tetapi dalam perkembangan tersebut laju pertumbuhan sektor pertanian sebesar 17,00 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laju per-tumbuhan sektor industri 15,07 persen. Namun demikian ternyata produktivitas dan pendapatan nyata di sektor industri lebih besar dari pendapatan nyata dan produktivitas di sektor pertanian. Ketimpangan tersebut memerlukan perhatian khusus pada pelak-sanaan pembangunan di masa yang akan datang sebab tanpa intervensi pemerintah, ketimpangan tersebut akan semakin parah dan akan berlangsung lama.
- d. Sektor pertanian dengan laju pertumbuhan sebesar 13,15 persen menyebabkan sumbangannya terhadap PDRB 0,79 persen menjadi 0,80 persen pada tahun 1998. Lain halnya dengan sektor industri migas, laju pertumbuhan yang dicapai 15,99 persen menyebabkan peranannya terhadap PDRB meningkat dari 59,30 persen menjadi 67,30 persen, tetapi peningkatan peranannya terhadap PDRB tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang memadai.
- e. Pengalaman menunjukkan bahwa sektor industri hanya dipicu untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi dalam rangka meningkatkan ekspor non migas. Dengan dasar kebijakan ini maka sektor industri tidak dapat diharapkan untuk menyerap tenaga kerja dan karenanya sumbangannya untuk mengentaskan kemiskinan sangat kecil. Dengan orientasi industri untuk meningkatkan ekspor non migas, mengakibat-kan peranan sektor industri tidak dapat saling mengkait antara sektor pertanian dengan sektor industri, antara industri hulu dengan industri hilir. Peranan industri hulu justru senakin meningkat tetapi tidak diikuti oleh perkembangan industri hilir.

Pengalaman menunjukkan dengan tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak diiringi oleh distribusi pendapatan yang lebih merata dan adil yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari ketimpangan relatif yaitu distribusi pendapatan dalam golongan masyarakat, antara masyarakat yang ber-penghasilan rendah, sedang dan masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Strategi pembangunan daerah Kota Batam selama hampir tiga puluh tahun telah menitikberatkan di bidang ekonomi dengan konsentrasi sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Pembangunan sektor industri telah mampu mengangkat perekonomian daerah melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan baik pemerintah (melalui peningkatan pajak, dan devisa) maupun masyarakat. Sejak terjadinya krisis moneter dan berlanjut dengan krisis ekonomi, karena industri di Batam berorientasi ekspor, merosotnya nilai rupiah justru mendorong ekspor, demikian juga di sektor pariwisata, krisis ekonomi justru menyebabkan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara. Namun demikian, akibat standar harga yang lebih berorientasi kepada mata uang asing (Dollar Singapura), maka naik turunnya nilai tukar mata uang (kurs) menyebabkan harga kebutuhan pokok rakyat juga ikut berfluktuasi yang sulit diikuti oleh pendapatan masyarakat yang relatif tetap. Ekonomi biaya tinggi sangat dirasakan oleh masyarakat. Akibat lebih lanjut adalah individualisme yang semakin kental muncul sebagai akibat persaingan hidup yang semakin ketat.

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Pulau Batam yang pembangunan fisiknya ditangani oleh Otorita Batam dengan dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan hasil dari pengelolaan kawasan Pulau Batam sendiri, investasi swasta, dukungan teknologi yang padat modal dengan industri yang berorientasi ekspor telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada bagian lain, wilayah kepulauan di sekitar Pulau Batam yang merupakan *hinterland* penanganannya dilakukan oleh Pemerintah Kota yang dalam berbagai segi mengalami keterbatasan dibandingkan dengan Otorita Batam, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pembangunan di daerah *hinterland* tersebut mengalami ketertinggalan dan kesenjangan yang cukup jauh dibandingkan dengan daerah *mainlandnya*.

Tatanan ekonomi yang ada di Kota Batam cenderung menunjukkan corak yang berorientasi ekspor dan tidak adanya keterkaitan dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan lainnya yang dimiliki baik Batam sendiri maupun yang ada di Propinsi Riau dan hanya mengandalkan efek “*spill-over*” dari Singapore. Disamping itu pula kegiatan pembangunan yang berorientasi ekspor, teknologi tinggi dan PMA sangat kurang memberikan efek multiplier bagi daerah, sehingga kondisi tersebut berdampak semakin tajamnya kesenjangan sosial. Rentannya kondisi perekonomian masyarakat Kota Batam juga tidak luput dari struktur perekonomian yang di dominasi oleh sektor industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi. Sektor-sektor tersebut berkembang tidak berbasis kerakyatan. Pada sisi lain kebijaksanaan pembangunan daerah dalam bidang ekonomi kurang mampu menjangkau dan mengejar perkembangan serta pertumbuhan Pulau Batam yang demikian pesat

Program pemulihan kembali perekonomian terdiri dari tiga aspek. Pertama kebijakan stabilitas ekonomi makro jangka pendek. Kedua reformasi ekonomi jangka menengah untuk memerangi distorsi, oligopoli serta monopoli yang tidak perlu. Selain mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir anggota masyarakat, kebijakan ini juga sekaligus ditujukan untuk meningkatkan efisiensi maupun produktivitas perekonomian masyarakat.

Aspek ketiga dari pemulihan ekonomi itu adalah untuk membangun kembali lembaga perekonomian, termasuk infrastruktur pasar dengan cara meningkatkan transparansi guna menurunkan biaya transaksi. Pada gilirannya pembangunan infrastruktur pasar, sebagai bagian dari pembangunan masyarakat madani, memerlukan perbaikan sistem hukum, sistem akuntansi maupun sistem politik. Hanya dengan demikian, dapat dicegah terulangnya kembali praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang telah merusak seluruh sendi-sendi kehidupan sosial selama masa Orde Baru.

Pentingnya memprioritaskan program pemulihan perekonomian yang rasional dan konsisten di atas sangat diperlukan untuk dapat memanfaatkan tanda-tanda awal pemulihan perekonomian yang telah ada sejak saat beberapa bulan terakhir ini. Tanda-tanda positif yang masih lemah itu perlu dijaga dan dipelihara secara hati-hati mengingat masih adanya kesulitan ekonomi regional, ketidakpastian ekonomi dunia maupun keterbatasan negara-negara donor untuk terus membantu ekonomi.

Gelombang reformasi yang terjadi menuntut adanya perubahan yang mendasar di segala bidang yang menyangkut kebijakan dan praktek di bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi dituntut kebijakan pembangunan perekonomian yang lebih berorientasi kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu memberi perhatian yang lebih besar pada upaya pengembangan usaha-usaha kecil, menengah dan koperasi. Tuntutan tersebut sebenarnya sudah direspon melalui ketetapan MPR Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai soko guru perekonomian haruslah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diupayakan secara konseptual dan diperjuangkan secara konsisten. Masih banyak kendala yang dihadapi dalam membangun perekonomian yang berbasis kerakyatan, terutama yang bersumber pada berbagai perangkat hukum, kebijakan, dan implementasinya di lapangan yang belum memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lebih luas lagi untuk berperan. Mekanisme pasar masih dikuasai oleh usaha skala besar yang memonopoli supply bahan baku dan perdagangan hasil produksi, sehingga menempatkan usaha kecil pada posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang selalu lemah.

Iklim usaha yang selama ini terbentuk tidak cukup kondusif untuk berkembangnya usaha ekonomi rakyat. Usaha kecil, menengah dan koperasi masih sulit mengakses ke berbagai fasilitas pengembangan yang tersedia, baik fasilitas permodalan, teknologi maupun pemasaran. Selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memberikan perhatian pada usaha kecil, menengah dan koperasi di sektor masing-masing.

Dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi selama ini, di Kota Batam disamping dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan masih dirasakan, upaya pemulihan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi rakyat masih menghadapi sejumlah masalah dan kendala yang dapat menghambat jalannya pembangunan, maka permasalahan utama sebenarnya terletak pada adanya ketimpangan yang bersifat struktural yang mencakup :

- a. Kesenjangan pembangunan antara daerah yang selama ini dikelola oleh Otorita Batam yakni daerah *mainland* yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat baik dari sisi Prasarana dan sarana infrastruktur maupun masyarakatnya dengan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam yakni daerah *hinterland* yang sangat tertinggal karena mengandalkan pada sektor primer (hasil pertanian).
- b. Kesenjangan antara sektor-sektor perekonomian; Peranan sektor pertanian pada PDRB hanya 1,69 persen ataupun dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi rata-rata 17,00 persen. Sedangkan sektor industri peranan terhadap PDRB sebesar 70,21 persen dengan laju pertumbuhan 15,07 persen. Hal ini berarti bahwa produktivitas sektor industri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas sektor pertanian sehingga pada akhirnya menimbulkan Kesenjangan dalam distributive pemerintahan pendapat dalam masyarakat.

- c. Ketimpangan relatif juga merupakan masalah dan tantangan di Kota Batam, yang juga menjabarkan besarnya tingkat kemiskinan relatif di antara golongan masyarakat yaitu pada tahun 1999 sebesar 40 persen penduduk yang berpenghasilan rendah hanya menerima 19,52 persen dari jumlah pendapatan, 40 persen penduduk yang berpenghasilan menengah menerima 51,92 persen dari jumlah pendapatan, sedangkan 20 persen penduduk yang berpenghasilan tinggi telah menerima 28,56 persen dari jumlah pendapatan regional.
- d. Secara umum tingkat pendidikan penduduk Kota Batam tergolong cukup baik, karena sebagian besar atau 53,36 persen penduduk yang berusia 10 tahun keatas pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SLTA, sedangkan yang berpendidikan tertinggi SLTP sebanyak 15,47 persen dan SD sebanyak 16,94 persen (hasil sensus penduduk 2000). Namun mengingat visi dan misi kedepan Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani tentunya memerlukan sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkualitas serta profesional yang lebih baik dari saat ini terutama dalam menghadapi daya saing dan produktivitas sumber daya manusia yang cukup handal di negara-negara tetangga kita.
- e. Selain masalah ketimpangan struktural dan ketimpangan relatif usaha ekonomi rakyat juga berhadapan dengan kendala internal yang menghambatnya untuk mendapatkan peluang yang sudah terbuka. Secara individual usaha ekonomi rakyat yang umumnya belum dikelola secara profesional karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mereka. Selain itu kurang gigih dalam memajukan usaha dan cepat puas dengan sedikit keberhasilan yang sudah dicapai.
- f. Kendala yang sama juga dihadapi oleh koperasi yang pada dasarnya bersumber pada rendahnya sumberdaya manusia. Kendala tersebut selanjutnya menurunkan berbagai masalah antara lain: (1) kekurangan-mampuan koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan mem-perluas skala usaha pangsa pasar (2) kelemahan koperasi dalam organisasi dan management koperasi (3) keterbatasan koperasi dalam mengakumulasi permodalan dari dalam anggota sendiri (4) keterbatasan koperasi dalam menguasai ilmu dan teknologi yang dapat membantunya dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatannya.
- g. Sementara itu perekonomian secara keseluruhan segera akan ber-hadapan dengan sejumlah tantangan eksteren yang sangat besar. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan arus liberalisasi dan globalisasi ekonomi sebagai hasil kesepakatan perdagangan dan investasi multilateral dan regional, secara bertahap telah menghilangkan batas-batas wilayah dan mengintegrasikan dalam perekonomian global. Tantangan tersebut itu diperkuat oleh kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi telah menumbuhkan dunia tanpa batas.
- h. Dalam rangka upaya memperbaiki tatanan struktural perekonomian Kota Batam dan sekaligus menekan munculnya masalah sosial akibat ketimpangan sosial ekonomi, pemerintah telah membuka peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi rakyat,

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dengan daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan usaha kecil menengah dan koperasi sesuai dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing.

Kota Batam sebagai pusat pengembangan industri yang telah berkembang, merupakan pangsa pasar yang amat potensial bagi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, terutama dalam memperoleh kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan pokok karyawan pada industri, menyediakan bahan baku industri dan kalau mungkin turut berpartisipasi dalam mengerjakan salah satu kegiatan dalam proses produksi bagi industri yang ada.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata tingkat, maka bagi Kota Batam adalah merupakan peluang bagi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, terutama sebagai pangsa untuk hasil-hasil produksi industri kecil yang menghasilkan alat-alat rumah tangga, cenderamata, hasil pertanian di sekitar daerah *mainland*, dan membuka kesempatan kerja sebagai pramuwisata.

Letak Kota Batam yang berseberangan dengan Singapore yang merupakan pusat perdagangan internasional, merupakan peluang pangsa yang potensial khususnya bagi petani di daerah *hinterland* untuk memasarkan hasil usahanya seperti perikanan laut, ternak besar, ternak kecil, telur, pangan dan hortikultura, buah-buahan segar dan lain-lain.

Memperhatikan kondisi dan perkembangan ekonomi rakyat serta berbagai masalah tantangan dan kendala yang dihadapinya maka upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian daerah. Perumbuhan structural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh dan ekonomi sub system ke ekonomi pasar dan ekonomi ketergantungan ke arah mandiri. Perubahan struktur ini mengisyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan teknologi, serta pemberdayaan sumberdaya manusia.

Sebagai Implementasi dari kebijakan tersebut di atas, maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis yaitu :

- a. Mengupayakan peluang dan akses yang lebih besar kepada aset produksi. Diantaranya bermacam asset produksi yang paling penting adalah akses kepada sumber dana. Tersedianya injeksi dana yang memadai sehingga dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Sebagai produsen dan penjual posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangat lemah. Dalam persaingan yang tidak seimbangan ini keuntungan pada pengusaha besar. Keadaan ini harus diperbaiki. Untuk itu pertama-tama rakyat harus dibantu dengan sarana prasarana perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produknya. Selain itu upaya yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat pola transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat ini dengan pendekatan kebersamaan melalui wadah koperasi. Dengan membangun kesetiakawanan dan rasa kebersamaan akan menumbuhkan kepercayaan dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi.

- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Kebijakan pengembangan industri haruslah mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar, industri rakyat yang berkembang menjadi industri kecil dan menengah yang kuat haruslah menjadi pendukung utama bagi perkembangan perekonomian Kota Batam. Proses industrialisasi haruslah mengarah ke perdesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang pada umumnya dari sektor pertanian.
- e. Kebijaksanaan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru yang berkembang menjadi wirausaha yang kuat dan saling menunjang.
- f. Pemerataan pembangunan antara daerah *mainland* dengan *hinterland* khususnya antara daerah perdesaan di pulau-pulau sekitarnya.

2.2.4 Kenaikan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Konsep awal pembangunan Batam memang untuk kepentingan nasional, sehingga pada prinsipnya untuk pembangunan Batam sangat terbuka bagi masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Akibatnya migrasi sangat tinggi, (pertumbuhan penduduk mencapai rata-rata 12,87 % selama periode 1990-2000). Bertolak dari konsep tersebut, pembangunan Batam tidak diawali dengan penyiapan sumber daya manusia tempatan sesuai proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Akibatnya, arus tenaga kerja dari luar daerah membanjir ke Batam, sehingga dirasakan bagi penduduk tempatan kurang siap untuk berpartisipasi dalam pembangunan Batam, dan kalah bersaing dengan pendatang.

Di antara migran yang ada, terdapat mereka yang bekerja secara temporer di sektor konstruksi dan jasa dengan tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan dan dari strata ekonomi lemah, sehingga telah ikut pula mendorong berkembangnya sektor informal, dan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan mereka membangun rumah di daerah-daerah yang bukan diperuntukkan bagi permukiman, sehingga berkembanglah kawasan permukiman liar yang sangat tidak memenuhi syarat sebagai suatu kawasan permukiman yang layak. Sikap pemerintah dalam menghadapi fenomena tersebut, menunjukkan sikap yang dualisme, dimana pada satu sisi keberadaan mereka dibutuhkan sebagai penyedia tenaga kerja yang murah dan untuk kerja kasar (buruh/tukang), namun disisi lain mereka dianggap sebagai para pemukim liar yang perlu ditertibkan. Dampak lain dari aspek demografi dan ketenagakerjaan ini adalah segi-segi keamanan dan ketertiban, yang jika tidak dapat ditanggulangi dan dikendalikan akan memberikan citra buruk bagi Batam.

Sejalan dengan perkembangan Batam sebagai daerah industri dan daerah perdagangan yang maju, maka telah pula memberikan dampak sampingan yang cukup serius terhadap permasalahan sosial antara lain meningkatnya jumlah keluarga miskin. Menurut pendataan keluarga tahun 2000 oleh BKKBN keluarga Prasejahtera 673 KK atau 1,08 persen dari total keluarga, dan Sejahtera I sebanyak 19.684 KK, atau 31,8 persen dari total keluarga yang didata. Dilihat dari segi ketimpangan relatif terlihat ada-nya kecenderungan ketidakmerataan yang meningkat di antara golongan penduduk. Ketidakmerataan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut diperkuat dengan semakin besarnya angka Indeks Gini Ratio di Kota Batam.

Tabel 2.4 : Distribusi Pendapatan Antara Kelompok dan Indeks Gini Kota Batam Tahun 1995, 1999 dan 2005.

No	Keterangan	1995	1999	2005
1.	40% Penduduk Berpenghasilan Rendah Menerima Bagian Persentase dari Jumlah Pendapatan	19,99	19,52	20,47
2.	40% Penduduk Berpenghasilan Sedang Menerima Bagian Persentase dari Jumlah Pendapatan	53,34	51,92	48,35
3.	20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi Menerima Bagian Persentase dari Jumlah Pendapatan	26,67	28,56	31,18
4.	Indek GINI	0,2146	0,3047	0,2146
5.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	17,41	6,38	9,63

Sumber : Program Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2001 – 2005

Pertumbuhan ekonomi di Kota Batam pada tahun 1995 sebesar 17,41 persen dan pada masa krisis ekonomi laju pertumbuhan ekonomi melorot sehingga mencapai 3,08 persen. Pertumbuhan yang tinggi pada pokoknya dipacu oleh perkembangan yang pesat dari kawasan industri di Pulau Batam. Perkembangan kawasan industri tersebut bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dilain pihak mengakibatkan arus migrasi ke daerah Batam yang semakin tinggi, sehingga meningkatkan laju pertumbuhan penduduk yang pada tahun 1998 mencapai 14,50 persen. Pengaruh lebih lanjut dari keadaan ini adalah semakin besarnya pengangguran, dan selanjutnya mengakibatkan kerawanan sosial, seperti gangguan keamanan, timbulnya perumahan liar dan permukiman kumuh, dan lain-lain. Jika keadaan ini tidak dapat dikendalikan, maka laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengganggu perekonomian Kota Batam secara keseluruhan karena diperlukan biaya penertiban yang tinggi sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Untuk itu perlu segera diambil langkah-langkah kebijaksanaan -langkah sebagai berikut :

- a. Perlu dipikirkan pembatasan terhadap pendatang baru, umpamanya dengan menetapkan dan mengumumkan kesempatan kerja yang diperlukan dan persyaratan-persyaratan tenaga kerja yang diperlukan serta lapangan kerja yang ada.
- b. Penertiban rumah-rumah liar dengan merencanakan pemukiman baru yang sesuai dengan tata ruang Kota Batam, dengan mencadangkan lokasi perumahan baru.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama di kawasan industri di Kota Batam, juga menimbulkan kesenjangan antara kawasan Pulau Batam dengan daerah di sekelilingnya (*hinterland*). Hal ini dapat dilihat pada ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas umum dan sosial yang menyolok antara kawasan otorita dengan daerah yang tidak termasuk Otorita Batam yang sebenarnya pendukung daerah kawasan Otorita Batam terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, penyediaan tenaga kerja, dan pengangkutan antar pulau di Kota Batam.

- d. Pertumbuhan dan perkembangan kinerja dari sektor - sektor pem-bangunan di Kota Batam cukup baik serta target pertumbuhan hampir dicapai. Namun demikian banyak sektor potensial belum digarap, karena faktor keterbatasan dana serta kualitas aparatur pemerintah. Kualitas aparatur pemerintah di pedesaan dan kelurahan relatif masih rendah jika dibandingkan kebutuhan pembangunan. Di bidang aparatur disamping masih diperlukan pembinaan melalui pendidikan dan latihan juga diperlukan restrukturisasi, untuk dapat memenuhi kebutuhan pengembangan daerah yang sudah masuk dalam kerangka ekonomi global.
- e. Prospek perekonomian Kota Batam untuk periode selanjutnya cukup baik karena berdasarkan hasil-hasil pembangunan pada periode yang lalu, menjadikan Kota Batam sebagai pusat pelayanan jasa, pelayanan barang khususnya barang-barang impor dan menjadi daerah transit baik di dalam negeri maupun untuk luar negeri. Disamping Kota Batam sebagai pusat pengembangan industri, juga dapat dijadikan sebagai pusat pelayanan di Asia Tenggara untuk berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan, perhotelan dan lain-lain.

2.2.5. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah

Pemerintah Kota Batam yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 apabila dapat bersinergi dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau adalah merupakan suatu kekuatan pembangunan yang luar biasa yang akan dapat menggerakkan, mengembangkan, dan meningkatkan peranan Kota Batam sebagai daerah idustri, perdagangan, pariwisata, alih kapal dan pada akhirnya akan menjadi Bandar Dunia yang handal di kawasan Asia Tenggara.

Namun dari pelaksanaan otonomi yang telah berlansung selama hampir dua tahun tampaknya pihak pemerintah pusat belum mau untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang keberadaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam di Kota Batam, khususnya yang menyangkut kewenangan dan fungsi yang seharusnya telah menjadi kewenangan dan fungsi Pemerintah Kota Batam.

Hal ini apabila tidak segera diselesaikan oleh pemerintah pusat, maka akan terjadi kurang serasian dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta pada akhirnya akan menimbulkan konflik internal sesama lembaga pemerintah yang memiliki dampak yang cukup luas terutama terhadap kegiatan investasi yang pada saat sekarang telah berjalan cukup baik.

Sementara itu di sisi lain pemerintah kota yang baru terbentuk pada saat sekarang sedang dalam upaya pembenahan baik pembenahan kelembagaan, perangkat hukum dan ketentuan, maupun dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kondisi ini akan menjadi *bottleneck* bagi pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bab 3

Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan Kota Batam adalah “**Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani**”.

3.1.1 Penjelasan Makna dan Pilar Pranata Bandar Dunia yang Madani

1. Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang sangat pesat dimasa yang akan datang adalah Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak dan posisi yang strategis maupun daya dukung yang ada adalah merupakan salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia.
2. Madani dalam pengertiannya merupakan masyarakat yang sopan santun, beradab serta berbudaya tinggi, dimana masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan baik yang rumit maupun yang mudah selalu dihadapi dengan sopan santun dan beradab serta dalam mencari jalan keluar selalu melalui musyawarah.
3. Pilar/tiang pranata yang harus dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat madani adalah meliputi peranan ulama atau ahli ilmu yang konsisten, umarah yang mengemban kepemimpinan, pelaku perekonomian masyarakat, pekerja dan rakyat yang loyal.

Misi pembangunan daerah untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah Kota Batam adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ.
2. Mengembangkan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, alih kapal dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang mempunyai akses ke pasar global.
3. Mengembangkan nilai-nilai seni, budaya dan olahraga.
4. Menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat berlandaskan supremasi hukum.
5. Mempercepat pembangunan daerah Hinterland.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi dasar pembangunan Kota Batam adalah :

1. Menciptakan, menjaga, memupuk dan mengoptimalkan manfaat dan kesempatan yang muncul dari keunggulan lokal yang dimiliki Batam, serta mempertahankan daya saing di pasar bebas.
2. Mengantisipasi kecenderungan global (termasuk hal-hal yang merugikan seperti pembangunan terusan KRA di Muangthai), agar dapat meningkatkan posisi daya saing Batam di pasar dunia.
3. Menciptakan peluang-peluang ekonomi di bidang industri, perdagangan dan pariwisata, dalam rangka mengefektifkan prasarana dan sarana yang telah tersedia dengan lengkap dan modern.
4. Menjadikan Kota Batam, sebagai “*Free Trade Zone*” dalam rangka memantapkan peranannya sebagai mesin penggerak pembangunan Indonesia Bagian Barat.
5. Membuka akses ke pasar dunia, sehingga pada saat berakhirnya tugas Badan Otorita Batam, Pemko Batam sudah dikenal dunia sebagai badan pengganti Badan Otorita Batam dalam pengelolaan Kota Batam.

B. Kebijaksanaan Umum pembangunan Kota Batam ke depan adalah:

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia, terutama agar dapat mengisi peluang usaha yang ada, melalui :
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan jalur sekolah agar sejalan dengan pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berwawasan IPTEK dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
 - b. Mengembangkan pendidikan jalur luar sekolah dan pelatihan agar memiliki *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja serta kebutuhan pembangunan.
 - c. Mengembangkan aspek sosial budaya masyarakat dalam rangka membangun dan mengembangkan nilai-nilai sosial baru yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pengembangan wawasan, etos kerja, dan semangat berkarya.
 - d. Meningkatkan pendidikan agama, serta meningkatkan apresiasi kesenian dan budaya daerah, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berwawasan iman dan taqwa (IMTAQ).
2. Mengembangkan keterkaitan ekonomi antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya (*hinterland*), melalui :
 - a. Mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang berskala kecil dan menengah oleh masyarakat yang berada di daerah *hinterland* sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya alam yang tersedia.
 - b. Mengembangkan kemitraan atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara usaha-usaha yang ada di Pulau Batam dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat yang berada di daerah *hinterland*.
 - c. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat di daerah *hinterland* agar lebih diversifikatif, melalui perluasan akses terhadap permodalan, informasi pasar, teknologi tepat dan aset produksi lainnya.

3. Mengembangkan Rekayasa Sosial, melalui :
 - a. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami arah dan gerak pembangunan yang sedang dan akan berkembang pada masa yang akan datang.
 - b. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk lebih memacu dan mendorong lagi aktifitas, kreatifitas, inovasi dan motivasi masyarakat.
 - c. Menumbuhkembangkan kelembagaan lokal masyarakat agar dapat berfungsi dan berperan secara optimal dalam pembangunan.
 - d. Memberdayakan masyarakat miskin, dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.

4. Mengembangkan infrastruktur fisik kota, melalui :
 - a. Meningkatkan kemampuan infrastruktur fisik kota baik kualitas maupun kuantitas secara merata ke seluruh wilayah Kota Batam, terutama di daerah *hinterland* yang relatif masih tertinggal
 - b. Mengembangkan infrastruktur fisik kota yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.
 - c. Membangun fasilitas kota untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan dan kemudahan bagi masyarakat.

3.3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

3.3.1 Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Sosial

Pembangunan Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib dan dinamis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Kota Batam bersama-sama dunia usaha, masyarakat dan komponen pembangunan lainnya harus dapat melaksanakan pembangunan secara berencana, bertahap, ber-kelanjutan dan terpadu agar dapat memberikan hasil yang optimal dapat dirasakan dan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Kota Batam dan sekitarnya secara bersama-sama. Sejak terjadinya krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan telah berubah menjadi krisis kepercayaan dengan puncaknya digulirkan reformasi, maka banyak tatanan kehidupan berbangsa berusaha dirubah total yang bertujuan untuk mencapai tatanan yang lebih baik lagi.

Upaya pengendalian stabilitas dan pemulihan kembali kegiatan perekonomian memerlukan stabilitas sosial. Pada gilirannya, pemulihan kembali stabilitas sosial memerlukan pembaruan sistem sosial atau reformasi berdasarkan kontrak sosial. Kontrak sosial baru itu hendaknya didasarkan pada tuntutan masyarakat yang marak dalam era reformasi dewasa ini. Kontrak sosial yang baru hendaknya dapat mewujudkan demokrasi politik berdasarkan perwakilan yang sebenarnya serta menjamin partisipasi aktif seluruh warga negara. Secara eksplisit sistem sosial baru itu harus dapat mengakui dan menjamin ke-Bhinnekaan Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai ras, suku, agama dan adat istiadatnya sendiri-sendiri. Sistem sosial baru itupun harus dapat mengoreksi distorsi serta konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi guna menjamin adanya kesamaan hak politik warga negara, otonomi daerah serta pemerataan ekonomi. Pendek kata kontrak sosial yang baru itu harus dapat mengikut sertakan dan memobilisasi potensi dari seluruh lapisan masyarakat serta menjamin keadilan maupun pemerataan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

3.3.2. Mewujudkan Supremasi Hukum dan *Good Governance*

Kota Batam relatif lebih mudah menentukan berbagai kelembagaan strategis pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Tentu kesempatan ini dapat dimanfaatkan seefektif mungkin dan belajar dari daerah lain dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Yang jelas kekhasan Kota Batam dengan pluralitas dalam masyarakat pelabuhan, dan berada di barisan garda depan Selat Melaka, dan tempat keluar barang-barang produksi seperti produk industri, dan sekaligus pariwisatanya dengan berbagai permasalahan hukum yang lebih kompleks.

Tentu agenda lokal di era reformasi adalah mengembalikan kedaulatan hukum di tangan rakyat, dengan pemberdayaan masyarakat yang diekspresikan pada peranan sumbangan hukum, tercermin mengu-rangi kekuasaan negara dan pemerintah dalam penyelenggaraannya. Perhatian utama pada seluruh bidang hukum pada pembuatan (*legislation*), peradilan (*judiciary*), dan pelaksanaan (*enforcement*). Dengan kerangka itulah reformasi hukum tidak dapat dipisahkan dengan reformasi politik, sehingga untuk mewujudkan supremasi hukum dan *Good Governance* perlu dilakukan:

1. Menumbuhkan wacana demokrasi yang tercermin dalam infrastruktur kehidupan bermasyarakat egalitarian, dan dimana - mana manusia hidup dan berinteraksi sesamanya sebagai berkesamaan derajat dan hak. Dari sana diharapkan mengarah kepada apa yang disebut dengan *civil society*.
2. Membangun masyarakat hukum, adalah dengan mengurangi peranan kekuasaan dan pemerintah dalam penyelenggaraan hukum, dengan pemberdayaan masyarakat pada semua aspek bidang hukum, pengadilan (*judiciary*), pembuatan (*legislation*) dan pelaksanaannya (*enforcement*).
3. Terselenggaranya hubungan antara masyarakat yang dapat mendukung kepentingan daerah, upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan Kota Batam dalam menghadapi tantangan per-dagangan bebas.

3.3.3 Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah

Program pemulihan kembali perekonomian terdiri dari tiga aspek yaitu:

1. Kebijakan stabilitas ekonomi makro jangka pendek.
2. Reformasi ekonomi jangka menengah untuk memerangi distorsi, oligopoli serta monopoli yang tidak perlu. Selain mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir anggota masyarakat, kebijakan ini juga sekaligus ditujukan untuk meningkatkan efisiensi maupun produktivitas perekonomian masyarakat.
3. Pemulihan ekonomi itu adalah untuk membangun kembali lembaga perekonomian, termasuk infrastruktur pasar dengan cara meningkatkan transparansi guna menurunkan biaya transaksi. Pada gilirannya pembangunan infrastruktur pasar, sebagai bagian dari pembangunan masyarakat madani, memerlukan perbaikan sistem hukum, sistem akuntansi maupun sistem politik. Hanya dengan demikian, dapat dicegah terulangnya kembali praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang telah merusak seluruh sendi-sendi kehidupan sosial selama masa Orde Baru.

Pentingnya memprioritaskan program pemulihan perekonomian yang rasional dan konsisten di atas sangat diperlukan untuk dapat memanfaatkan tanda-tanda awal pemulihan perekonomian yang telah ada sejak saat beberapa bulan terakhir ini. Tanda-tanda positif yang masih lemah itu perlu dijaga dan dipelihara secara hati-hati mengingat masih adanya kesulitan ekonomi regional, ketidakpastian ekonomi dunia maupun keterbatasan negara-negara donor untuk terus membantu ekonomi.

3.3.4 Pengurangan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di Kota Batam pada tahun 1995 sebesar 17,41 persen dan pada masa krisis ekonomi laju pertumbuhan ekonomi melorot sehingga mencapai 3,08 persen. Pertumbuhan yang tinggi pada pokoknya dipacu oleh perkembangan yang pesat dari kawasan industri di Pulau Batam. Perkembangan kawasan industri tersebut bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dilain pihak mengakibatkan arus migrasi ke daerah Batam yang semakin tinggi, sehingga meningkatkan laju pertumbuhan penduduk yang pada tahun 1998 mencapai 14,50 persen. Pengaruh lebih lanjut dari keadaan ini adalah semakin besarnya pengangguran, dan selanjutnya mengakibatkan kerawanan sosial, seperti gangguan keamanan, timbulnya perumahan liar dan permukiman kumuh, dan lain-lain. Jika keadaan ini tidak dapat dikendalikan, maka laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengganggu perekonomian Kota Batam secara keseluruhan karena diperlukan biaya penertiban yang tinggi sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Langkah-langkah kebijakan yang diambil sebagai berikut :

1. Perlu dipikirkan pembatasan terhadap pendatang baru, umpamanya dengan menetapkan dan mengumumkan kesempatan kerja yang diperlukan dan persyaratan-persyaratan tenaga kerja yang diperlukan serta lapangan kerja yang ada.

2. Penertiban rumah-rumah liar dengan merencanakan pemukiman baru yang sesuai dengan tata ruang Kota Batam, dengan mencadangkan lokasi perumahan baru.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama di kawasan industri di Kota Batam, juga menimbulkan kesenjangan antara kawasan Pulau Batam dengan daerah di sekelilingnya (*hinterland*). Hal ini dapat dilihat pada ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas umum dan sosial yang menyolok antara kawasan otorita dengan daerah yang tidak termasuk Otorita Batam yang sebenarnya pendukung daerah kawasan Otorita Batam terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, penyediaan tenaga kerja, dan pengangkutan antar pulau di Kota Batam.
4. Pertumbuhan dan perkembangan kinerja dari sektor - sektor pembangunan di Kota Batam cukup baik serta target pertumbuhan hampir dicapai. Namun demikian banyak sektor potensial belum digarap, karena faktor keterbatasan dana serta kualitas aparatur pemerintah. Kualitas aparatur pemerintah di pedesaan dan kelurahan relatif masih rendah jika dibandingkan kebutuhan pembangunan. Di bidang aparatur disamping masih diperlukan pembinaan melalui pendidikan dan latihan juga diperlukan restrukturisasi, untuk dapat memenuhi kebutuhan pengembangan daerah yang sudah masuk dalam kerangka ekonomi global.
5. Prospek perekonomian Kota Batam untuk periode selanjutnya cukup baik karena berdasarkan hasil-hasil pembangunan pada periode yang lalu, menjadikan Kota Batam sebagai pusat pelayanan jasa, pelayanan barang khususnya barang-barang impor dan menjadi daerah transit baik di dalam negeri maupun untuk luar negeri. Disamping Kota Batam sebagai pusat pengembangan industri, juga dapat dijadikan sebagai pusat pelayanan di Asia Tenggara untuk berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan, perhotelan dan lain-lain.
6. Untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode yang lalu, maka perlu dilanjutkan pada pelaksanaan pembangunan berikutnya. Prioritas utama ditujukan pada masyarakat miskin, korban pemutusan hubungan kerja, kelompok masyarakat rawan pangan dan rawan gizi, pelajar/siswa putus sekolah terutama pada tingkat Sekolah Dasar, serta berusaha untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

Bab 4

Program dan Prioritas Lima Tahunan Daerah

4.1 BIDANG EKONOMI

4.1.1 Industri

1. Isu Strategis

- a. Masih kurangnya kemitraan antara industri kecil dan menengah dengan industri besar
- b. Masih kurangnya penggunaan alih teknologi dalam pengembangan sektor industri.
- c. Pembangunan industri kurang melibatkan masyarakat setempat.
- d. Prasarana dasar yang menunjang kegiatan industri kurang memadai.
- e. Kurangnya kerjasama antar daerah dalam pengembangan industri.
- f. Kegiatan industri masih didominasi oleh industri elektronik.

2. Arah Kebijakan

Pembangunan industri selama lima tahun ke depan diarahkan pada pengembangan industri yang mempunyai akses ke pasar global dan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat terutama yang berada di daerah hinterland, melalui :

- a. Mengembangkan kawasan dan kegiatan industri yang berteknologi maju dan mempunyai keunggulan kompetitif yang mendorong pemanfaatan bahan baku lokal.
- b. Maksimalisasi pemanfaatan infrastruktur fisik yang telah ada dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk memperbesar peluang investasi di bidang industri.
- c. Mewajibkan kepada investor yang akan melakukan kegiatan usaha di Kota Batam untuk mengalihkan teknologinya kepada tenaga kerja lokal yang bekerja di bidangnya sehingga terciptanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lain.
- d. Menumbuhkembangkan industri kecil dan rumah tangga di daerah hinterland dalam rangka perluasan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan potensi ekonomi rakyat dengan memperbesar akses terhadap produksi, barang-barang modal, berteknologi tepat guna dan informasi pasar.
- e. Mengembangkan kemitraan atas dasar saling menguntungkan, terutama antara industri kecil-menengah dengan industri besar.
- f. Mengembangkan kerjasama antar daerah dalam rangka pengembangan industri hilir.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Penataan Struktur Industri dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemutahiran data industri kecil, menengah dan besar.
 - 2) Merencanakan pengembangan kawasan potensial untuk kegiatan industri yang kompetitif baik skala kecil, menengah dan besar.
 - 3) Melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan ketentuan dalam pengembangan kawasan industri.
 - 4) Mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di bidang industri.

- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan sosialisasi dan pembuatan ketentuan peraturan bagi investor dalam penggunaan tenaga lokal.
 - 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal di bidang industri dan perdagangan

- c. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pembinaan manajemen pengelolaan industri rumah tangga/kecil.
 - 2) Peningkatan mutu produk industri rumah tangga/kecil dengan teknologi tepat guna.
 - 3) Pemberian bantuan pendampingan & permodalan.
 - 4) Memberikan bantuan fasilitas promosi dan pemasaran.
 - 5) Pemberian bimbingan dan penyuluhan bagi peningkatan produksi industri rumah tangga, kecil dan menengah.
 - 6) Peningkatan pemanfaatan Informatika Teknologi bagi akses pasar global bagi industri kecil dan rumah tangga di daerah hinterland.
 - 7) Menyusun dan melaksanakan pola pengembangan kemitraan antara industri kecil dan menengah dengan industri besar.
 - 8) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan kemitraan.

4.1.2 Bidang Pertanian

4.1.2.1 Pertanian Rakyat

1. Isu Strategis

- a. Kurang optimalnya pemanfaatan lahan pertanian.
- b. Relatif masih rendahnya mutu sumber daya manusia di bidang pertanian.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan usaha pertanian.
- d. Relatif masih kurangnya partisipasi dunia usaha dalam menunjang kegiatan pengembangan usaha pertanian.
- e. Kurangnya penerapan teknologi dalam bidang pertanian.
- f. Kurang mantapnya sistem pemasaran terhadap komoditas pertanian.
- g. Tidak adanya data base kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian.

2. Arah Kebijakan

Meningkatkan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dalam arti luas secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani dan pemenuhan kebutuhan Kota Batam.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program dan Kegiatan Pembangunan Usaha Pertanian. Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.
 - 2) Pemanfaatan dan penerapan teknologi pertanian.
 - 3) Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan kepada petani secara intensif dan berkelanjutan.
 - 4) Meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses berbagai informasi di bidang pertanian.
 - 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian.
 - 6) Membuat dan mensosialisasikan perangkat hukum di bidang pertanian.
- b. Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan diversifikasi pertanian sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang diarahkan pada pola agroindustri dan agrobisnis.
 - 2) Melaksanakan diversifikasi pangan dan menu makanan.

4.1.2.2 Perikanan

1. Isu Strategis

- a. Makin berkurangnya penyediaan Sumber Daya perikanan.
- b. Belum dimanfaatkannya teknologi maju dalam pengembangan usaha perikanan.
- c. Kurang memadainya penyediaan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan.
- d. Masih terdapatnya sebagian nelayan tergantung pada tengkulak.
- e. Masih adanya penyalahgunaan izin daerah operasi dan penggunaan alat tangkap.
- f. Kurangnya keterlibatan nelayan dalam proses pemasaran hasil perikanan.
- g. Minimnya petugas perikanan di sentra kegiatan perikanan.

2. Arah Kebijakan

Meningkatkan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha perikanan dalam arti luas secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan pemenuhan kebutuhan Kota Batam.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pembangunan Usaha Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Memberikan stimulan bagi nelayan baik dalam bentuk modal, motivasi dan sarana penunjang dan teknologi.
 - 2) Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha perikanan.
 - 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Program Diversifikasi Pangan dan Gizi, dengan kegiatan mengembangkan komoditas perikanan secara terpadu.

4.1.2.3 Peternakan

1. Isu Strategis

- a. Relatif masih rendahnya minat masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usaha peternakan.
- b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang di bidang peternakan.
- c. Belum adanya usaha pembibitan hewan ternak.
- d. Relatif masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan.

2. Arah Kebijakan

Meningkatkan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha peternakan dalam arti luas secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan peternak dan pemenuhan kebutuhan Kota Batam.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program dan Kegiatan Pembangunan Usaha Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan dan penyebaran ternak berdasarkan potensi lokasi dan peta wilayah.
 - 2) Pembinaan peternak di daerah hinterland.
 - 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia peternak dan petugas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - 4) Peningkatan usaha dan industri peternakan.
 - 5) Pengembangan pembinaan dan penyuluhan kelembagaan dan kemitraan di bidang peternakan.
 - 6) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan di bidang peternakan.
 - 7) Pemberian bantuan modal usaha peternakan secara bergulir.
 - 8) Penambahan tenaga penyuluh lapangan di daerah penyebaran ternak.

- b. Program Diversifikasi Pangan dan Gizi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengawasan peredaran terhadap bahan asal hewan, bahan makanan asal hewan, obat hewan dan peredaran pakan ternak serta rumah potong hewan/unggas.
 - 2) Pencegahan, penolakan, pemusnahan dan pengawasan terhadap penyakit hewan menular.
 - 3) Inventarisasi potensi dan pengembangan kawasan produksi peternakan.

4.1.2.4 Perkebunan

1. Isu Strategis

- a. Belum adanya usaha pengembangan di bidang perkebunan secara komersial.
- b. Belum adanya tenaga penyuluh di bidang perkebunan.
- c. Tidak adanya data base kesesuaian lahan untuk kegiatan perkebunan.
- d. Kurangnya minat masyarakat bergerak di bidang perkebunan.

2. Arah Kebijakan

Meningkatkan kegiatan intensifikasi dan diversifikasi usaha perkebunan dalam arti luas secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan perkebunan dan pemenuhan kebutuhan Kota Batam.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program Pengembangan dan Pembinaan Perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi perkebunan.
- b. Melakukan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan kepada petani pekebun.
- c. Inventarisasi, sosialisasi dan mempromosikan potensi dan produk serta hasil perkebunan.
- d. Mengadakan sarana dan prasarana serta penataan kelembagaan di bidang perkebunan.

4.1.2.5 Kehutanan

1. Isu Strategis

- a. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap manfaat hutan terutama tentang pelestarian hutan.
- b. Masih lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap kerusakan hutan.
- c. Pemanfaatan kawasan hutan tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- d. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kehutanan.

2. Arah Kebijakan

- a. Mendorong upaya penataan kawasan hutan sesuai dengan kondisi dan peruntukannya sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya serta menjamin pemeliharaan kelestariannya serta fungsi hidrologinya.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan upaya penghijauan kota dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penyerapan gas karbon yang banyak diproduksi baik oleh industri ataupun masyarakat, memperluas daerah tangkapan air (catchment area) dan daerah hijau (green belt area) dan menjaga serta memelihara kestabilan permukaan tanah agar terhindar dari bahaya erosi/tanah longsor.
- c. Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap kawasan hutan dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program Pengembangan dan Pembinaan Kehutanan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Menyusun Rencana Induk Penataan Kawasan Hutan.
- 2) Melaksanakan gerakan massal penghijauan dan membangun kawasan hijau di perkotaan.
- 3) Pembinaan dan pelayanan pengembangan usaha di bidang kehutanan.
- 4) Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap seluruh kawasan hutan.
- 5) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kehutanan melalui pendidikan dan pelatihan.
- 6) Membuat dan mensosialisasikan serta penegakan perangkat hukum di bidang kehutanan.

4.1.3 Ketenagakerjaan

1. Issue strategis

- a. Etos kerja dari tenaga kerja yang masih rendah
- b. Balai Latihan Kerja (BLK) belum mampu menunjang penyediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar.
- c. Belum adanya perencanaan sumber daya manusia yang sesuai antara ketersediaan pasar tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
- d. Belum adanya perlindungan jaminan kesinambungan kerja terhadap tenaga kerja kontrak.
- e. Kualitas tenaga kerja melalui pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah belum memiliki daya saing yang tinggi.
- f. Masih kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai tenaga kerja dan sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan beragama.
- g. Belum adanya keseimbangan yang sama bagi tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan dalam memperoleh pekerjaan.

- h. Pemberian upah yang belum sesuai dengan standar upah yang berlaku kepada tenaga kerja dan dengan memperhatikan intensitas pekerjaan mereka.
- i. Belum terciptanya jaringan kerja dan sistem informasi bursa tenaga kerja antara lembaga pendidikan dari perusahaan penyalur tenaga kerja dan perusahaan penerima/pemakai jasa tenaga kerja.

2. Arah Kebijakan

Guna mengatasi permasalahan tersebut di atas dan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Batam, maka untuk lima tahun ke depan, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas tenaga kerja yang professional melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan Iptek serta permintaan pasar terhadap tenaga kerja baik untuk kebutuhan lokal maupun luar negeri.
- b. Mengembangkan potensi tenaga kerja lokal yang belum mendapat kesempatan kerja ataupun berusaha dengan meningkatkan keterampilan, memperluas pengetahuan dan wawasan, serta menumbuhkan etos kerja yang tinggi melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang khusus diselenggarakan dengan ditunjang oleh sistem permagangan.
- c. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui peningkatan perbaikan kesejahteraan tenaga kerja yang terus menerus, terutama di bidang pengupahan, pengembangan karir dan penegakan atas hak-hak dan kewajiban untuk memperoleh kepastian guna memberikan suasana nyaman, tenang dan tertib dalam bekerja.
- d. Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja khususnya keselamatan, kesehatan kerja, jaminan sosial dan bentuk perlindungan lainnya dengan mendorong berkembangnya lembaga perlindungan tenaga kerja dan lembaga penjamin kesejahteraan pekerja.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan dan latihan angkatan kerja profesional di bidang tekhnis, manajerial dan wiraswasta.
 - 2) Pendidikan dan latihan pemagangan khusus bagi tenaga kerja lokal.
 - 3) Melaksanakan pelatihan dengan pola kemitraan.
 - 4) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kejuruan.
 - 5) Melakukan inventarisasi potensi tenaga kerja lokal.
 - 6) Melakukan pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat di daerah hinterland sesuai dengan potensi daerah.
- b. Program Penyebaran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan melaksanakan penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja baik lokal maupun internasional.

- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas dan Kesempatan Kerja, dengan bentuk kegiatannya sebagai berikut :
 - 1) Penyesuaian terhadap Upah Minimum Daerah/Kota (UMD/K) dengan tingkat perkembangan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
 - 2) Mengembangkan sistem reward and punishment di kalangan pekerja.
 - 3) Mengembangkan nilai - nilai kerja yang positif, seperti berorientasi pada pencapaian kualitas, menerapkan sistem *Just in Time* dalam bekerja.
 - 4) Menerapkan & mengembangkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) secara konsisten.
- d. Program Pembinaan Hubungan Industri dan Perlindungan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja.
 - 2) Mengembangkan motivasi spritual untuk mengejar ketertinggalan ekonomi masyarakat Hinterland.
 - 3) Melakukan Penegakkan Hukum (*Law Enforcement*) terhadap berbagai bentuk peraturan di bidang ketenagakerjaan.
 - 4) Membina dan memberikan penyuluhan tenaga kerja.
 - 5) Membentuk lembaga yang mendukung peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja.

4.1.4 Perdagangan

1. Isu Strategis

- a. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengusaha kecil dan menengah.
- b. Rendahnya daya saing bagi pengusaha kecil dan menengah.
- c. Minimnya informasi tentang tata niaga ekspor dan import.
- d. Masih sulitnya untuk memperoleh modal bagi pengusaha kecil dan menengah.
- e. Dominasi pengusaha besar yang hampir menguasai seluruh sektor perdagangan.
- f. Kebijakan *Three Cooldown Effect* yang selama ini diterapkan tidak tepat sasaran.
- g. Minimnya deregulasi masalah tata niaga perdagangan.
- h. Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap jenis barang yang illegal yang masuk dari dan keluar Batam.

2. Arah Kebijakan

- a. Memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan di Kota Batam sendiri maupun yang transit untuk di re-ekspor dengan memanfaatkan institusi perdagangan dunia ataupun regional yang telah ada dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

- b. Memanfaatkan keunggulan komperatif wilayah Batam dan mengupayakan terwujudnya Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kerjasama perdagangan baik antar daerah di Indonesia, maupun dengan negara asing secara bilateral ataupun multilateral guna meningkatkan dan memperkuat kinerja ekspor dan import dari dan ke Batam.
- d. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan yang telah tersedia untuk meningkatkan aktifitas perdagangan.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Membangun Gedung Pusat Promosi (Promotion Centre) bagi berbagai produk yang dihasilkan baik oleh Kota Batam maupun di luar Kota Batam
 - 2) Melakukan promosi dan pameran dagang dalam dan luar negeri.
 - 3) Menyiapkan berbagai perangkat ketentuan peraturan di bidang perdagangan dan mensosialisasikannya.
 - 4) Melengkapi dan penataan fasilitas pendukung yang dapat menjadi daya tarik optimalisasi aktivitas perdagangan.
 - 5) Melaksanakan monitoring harga dan persediaan bahan pokok serta bahan penting lainnya.
- b. Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengawasan & pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan di bidang perdagangan.
 - 2) Menyusun konsep dan langkah strategis dalam rangka perwujudan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - 3) Melakukan sosialisasi konsep Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.
 - 4) Memberdayakan perangkat kelembagaan secara professional dalam era Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - 5) Sosialisasi dan konsultasi perdagangan lintas batas, AFTA, APEC dan WTO.
 - 6) Melaksanakan berbagai Diklat untuk meningkatkan kualitas kerjasama perdagangan bagi masyarakat dan pihak terkait.
 - 7) Meningkatkan fasilitas sarana teknologi dan informasi di bidang kerjasama perdagangan.

4.1.5 Pengembangan Usaha Daerah

1. Isu Strategis

- a. Masih kurangnya perhatian, pembinaan, pengarahan, bimbingan terhadap usaha kecil dan menengah.
- b. Belum adanya lembaga yang secara khusus menangani kegiatan promosi terhadap produk pengusaha kecil dan menengah.
- c. Masih kurangnya jalinan kemitraan antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar.

- d. Masih kurangnya penataan terhadap kegiatan usaha kecil dan menengah.
- e. Belum optimalnya promosi yang dilakukan untuk menarik investasi dalam skala besar.
- f. Kurangnya koordinasi dengan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri.
- g. Masih lemahnya sistem informasi penanaman modal.

2. Arah Kebijakan

- a. Melaksanakan promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan ataupun terhadap peluang investasi, baik melalui promosi langsung (*road show*) maupun tidak langsung ke daerah - daerah/wilayah di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai peluang pasar yang potensial.
- b. Mendorong terwujudnya kegiatan kemitraan di kalangan pengusaha ataupun pedagang atas dasar saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan.
- c. Memperbanyak pasar-pasar rakyat yang menjual produk-produk dalam dan luar negeri.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pengembangan Penanaman Modal, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Membangun sistem informasi penanaman modal daerah.
 - 2) Meningkatkan promosi kedalam maupun luar negeri untuk menarik investor.
 - 3) Melaksanakan koordinasi secara rutin dengan pelaku dunia usaha.
 - 4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal.
 - 5) Menyusun dan mensosialisasikan serta penegakan perangkat hukum di bidang pengembangan usaha daerah.
- b. Program Pengembangan Usaha Golongan Ekonomi Lemah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Menjalin kerjasama antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha kuat.
 - 2) Pemberian bantuan/penyediaan pinjaman modal dengan syarat yang lunak dan dilakukan secara bergulir.
 - 3) Pembentukan semacam lembaga keuangan non bank yang secara khusus menangani perguliran dana tersebut.
 - 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi UKM.
 - 5) Melaksanakan inventarisasi potensi pengembangan UKM.
 - 6) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi usaha kecil seperti pembangunan pasar dan penataan kawasan sektor informal.

4.1.6 Perkoperasian

1. Isu Strategis
 - a. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia keberadaannya masih belum bersaing secara wajar dengan kekuatan ekonomi lainnya.
 - b. Masih kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perkoperasian di Kota Batam.
 - c. Masyarakat lebih memandang koperasi sebagai lembaga sosial daripada lembaga ekonomi
 - d. Masih lemahnya kelembagaan koperasi dalam mengembangkan koperasi.
 - e. Masih rendahnya tingkat pengetahuan, kemampuan SDM untuk mengelola perkoperasian
 - f. Masih sulitnya memperoleh bantuan permodalan
 - g. Masih lemahnya kelembagaan perkoperasian
2. Arah Kebijakan
 - a. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil menengah dan koperasi dalam rangka perluasan kesempatan berusaha dan untuk memperkuat basis perekonomian daerah.
 - b. Mendorong pengembangan lembaga-lembaga pembiayaan dan keuangan yang mampu mendukung kegiatan usaha ekonomi kecil, menengah dan koperasi.
 - c. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta SDM untuk peningkatan aktifitas koperasi.
3. Program dan Kegiatan Pembangunan
Program Pengembangan Koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan inventarisasi potensi koperasi.
 - 2) Memberikan bantuan untuk peningkatan modal bergulir dan pinjaman bagi peningkatan kinerja koperasi.
 - 3) Meningkatkan dan mengembangkan lembaga perkoperasian ke arah kewirausahaan.
 - 4) Mengembangkan lembaga pembiayaan dan keuangan untuk kegiatan koperasi.
 - 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan pihak terkait di bidang koperasi melalui pelatihan, pendidikan dan bentuk program lainnya.
 - 6) Meningkatkan sistem manajemen keuangan, pelaporan, auditing bagi peningkatan aktifitas koperasi.
 - 7) Membantu fasilitas sarana dan prasarana peningkatan aktifitas koperasi.

4.1.7 Perhubungan

1. Isu Strategis

- a. Kurang tertibnya kehidupan kota akibat dari berkembangnya usaha angkutan kota illegal.
- b. Masih banyaknya bangunan dan aktivitas usaha yang dibangun di daerah milik jalan.
- c. Belum tersedianya jaringan jalan yang memadai di daerah *Hinterland*.
- d. Belum adanya standar angkutan umum yang layak.
- e. Belum adanya dermaga dan jetty yang memenuhi persyaratan perhubungan laut di Kota Batam.
- f. Belum tertatanya pelabuhan dengan baik.
- g. Belum adanya kegiatan angkutan laut reguler yang murah dan memiliki daya angkut yang memadai untuk orang dan barang guna menghubungkan daerah *Hinterland* dengan daerah *Mainland*.
- h. Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas Bandar udara yang telah ada.

2. Arah Kebijakan

- a. Membangun dan mengembangkan jaringan prasarana transportasi, terutama daerah hinterland untuk meningkatkan dan memperlancar arus mobilitas orang dan barang, terutama hasil produksi yang dihasilkan dari daerah tersebut.
- b. Meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan pelayanan transportasi dan komunikasi sebagai wujud dan tuntutan kebutuhan yang bersifat global dengan meningkatkan, mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi yang telah tersedia.
- c. Mengembangkan sistem transportasi massal yang mudah, murah, efisien, efektif dan merata ke seluruh daerah Kota Batam untuk memenuhi kebutuhan lokal.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan membangun jalan dan jembatan/pelantar.
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan/pelantar.
- c. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan, dengan kegiatan meningkatkan jalan dan jembatan/pelantar.
- d. Program Pengembangan Sarana Penunjang dengan kegiatan melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana penunjang bidang transportasi.
- e. Program Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Mengembangkan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan.
 - 2) Membangun terminal angkutan umum dan halte.
 - 3) Menertibkan rute transportasi dalam kota guna perluasan jangkauan pelayanan.

- 4) Mengadakan dan meningkatkan fasilitas angkutan umum.
 - 5) Mengembangkan sistem pengelolaan transportasi antar moda yang terintegrasi antara sistem transportasi laut, darat dan udara.
 - 6) Peningkatan dan sosialisasi pelaksanaan tata tertib lalu lintas.
- f. Program Pengembangan Fasilitas Laut dan Keselamatan Pelayaran, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Perluasan dan penertiban terminal penumpang angkutan laut.
 - 2) Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan dermaga pelabuhan bagi usaha pelayaran rakyat dari/ke wilayah *Hinterland*.
 - 3) Pembenahan sistem manajemen pembinaan bagi usaha pelayaran rakyat.
 - 4) Penataan jaringan reguler transportasi laut dari dan ke wilayah *Hinterland*.
 - 5) Peningkatan fasilitas pelayaran lalu lintas laut.
 - 6) Melakukan studi pengembangan transportasi laut terpadu di wilayah hinterland.
- g. Program Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Udara dan Keselamatan Penerbangan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan koordinasi bagi penyelenggaraan embarkasi/debarkasi perjalanan haji.
 - 2) Melakukan koordinasi secara komprehensif sistem manajemen transportasi udara.
 - 3) Meningkatkan koordinasi pengembangan dan pengoptimalan penggunaan fasilitas pelabuhan udara yang telah ada

4.1.8 Pertambangan dan Energi

1. Isu Strategis

- a. Masih belum meratanya penyediaan fasilitas tenaga listrik.
- b. Tidak adanya sumber tenaga listrik alternatif selain tenaga diesel.
- c. Masih adanya penambangan liar yang beroperasi.

2. Arah Kebijakan

- a. Mendorong percepatan pembangunan kilang penyulingan minyak (BBM) baik oleh Pertamina maupun oleh Swasta.
- b. Meningkatkan penelitian tentang pemanfaatan dan pengembangan sumber energi alternatif di Batam.
- c. Meningkatkan pembangunan pembangkit PLN, baik diesel maupun gas untuk menggerakkan ekonomi daerah pedesaan dan sekitar hinterland.
- d. Mengoptimalkan pengolahan beberapa bahan tambang dan galian dengan mempertimbangkan efisiensi serta kelestarian lingkungan dengan pembangunan berkesinambungan.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pengembangan Tenaga Migas, Batubara dan Energi lainnya, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Mempercepat pembangunan kilang BBM di daerah hinterland.
 - 2) Membangun Stasiun/pangkalan pengisian bahan bakar umum di daerah hinterland.
 - 3) Membantu fasilitas sarana dan prasarana pengembangan kilang BBM.
 - 4) Melakukan pengawasan dan monitoring pasar BBM.
 - 5) Melakukan studi dan inventarisasi potensi pengembangan sumber energi alternatif.

- b. Program Pengembangan Tenaga Listrik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas PLN di daerah Hinterland.
 - 2) Membantu penyediaan fasilitas sarana dan prasarana listrik desa dan listrik skala kecil untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
 - 3) Melakukan inventarisasi/studi kebutuhan listrik di Kota Batam terutama di daerah hinterland.
 - 4) Penambahan lokasi pusat pembangkit dan tenaga pembangkit listrik di Kota Batam terutama di daerah hinterland.

- c. Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Menyusun perangkat hukum di bidang pertambangan dan energi.
 - 2) Melaksanakan sosialisasi dan penegakan hukum dibidang pertambangan dan energi.
 - 3) Meningkatkan pengembangan dan pengawasan UKS, UKU dan UPTL.
 - 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengelolaan bahan tambang dan galian serta energi.

4.1.9. Pariwisata

1. Isue Strategis

- a. Kegiatan wisata yang telah berlangsung selama ini, kurang menonjolkan potensi nyata secara komprehensif dari karakteristik budaya Melayu.
- b. Lama menginap (*long stay*) dan pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan masing tergolong rendah.
- c. Kegiatan pariwisata yang berlangsung selama ini belum mencerminkan karakter dan budaya melayu.

- d. Kepariwisata Kota Batam masih tergantung kepada negara tetangga.
- e. Adanya citra Batam sebagai Kota Wisata Hiburan, sangat mengganggu citra masyarakat Melayu yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang bersuasana religius.

2. Arah Kebijakan

- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata Batam, terutama *Hinterland* dan mengembangkan objek-objek wisata yang telah ada serta mempunyai keunggulan komperatif untuk meningkatkan nilai jual.
- b. Menggali dan mengembangkan potensi sumberdaya alam dan sosial budaya Kota Batam untuk dapat dijadikan aset kepariwisataan yang baru, sehingga dapat semakin memperkaya objek wisata dan menciptakan keterkaitan antara usaha wisata dengan usaha ekonomi masyarakat tempatan.
- c. Meningkatkan kegiatan pemasaran kepariwisataan.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan mutu insan pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- e. Mengendalikan dan mengawasi dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas kepariwisataan dengan memperkuat jati diri masyarakat sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berakhlak, berbudi pekerti luhur, serta dengan memperkuat peran kelembagaan sosial lokal.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pengembangan Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) di Kota Batam.
 - 2) Pemantapan data base dan sistem informasi di bidang kepariwisataan.
 - 3) Meningkatkan kinerja lembaga pemasaran kepariwisataan.
 - 4) Melakukan promosi wisata baik ke dalam maupun keluar secara terarah, terencana dan terpadu.
 - 5) Melakukan pendidikan, pelatihan dan permagangan bagi pekerja lokal dalam mengelola kegiatan kepariwisataan.
 - 6) Pembinaan dan peningkatan koordinasi dengan pihak pengelola wisata (seluruh perusahaan pengelola objek wisata, usaha wisata, dan usaha jasa wisata).
 - 7) Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan kepariwisataan dalam rangka menjaga citra kepariwisataan Batam.
 - 8) Sosialisasi peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan.

- b. Program Pengembangan dan Pengelolaan objek wisata, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Mengembangkan dan menata kawasan wisata dan objek wisata lainnya dengan mempertimbangkan pelestarian nilai-nilai sejarah, religius, seni budaya.
 - 2) Membantu penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
 - 3) Meningkatkan partisipasi langsung penduduk tempatan dalam pengembangan dan pengelolaan bidang pariwisata.
 - 4) Peningkatan pelayanan kepariwisataan

4.1.10 Kelautan

1. Isu Strategis :

- a. Pengelolaan potensi kelautan masih belum optimal.
- b. Belum optimalnya lembaga yang memiliki tanggungjawab penuh dan jelas di bidang kelautan.
- c. Belum lengkapnya data base kelautan di Kota Batam.
- d. Rendahnya pengawasan dan pengamanan perairan di Kota Batam.
- e. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang kelautan
- f. Lemahnya penegakan hukum di bidang kelautan.

2. Arah Kebijakan :

- a. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perikanan, budidaya pantai dan kepariwisataan.
- b. Melanjutkan inventarisasi serta mengembangkan potensi kelautan yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lain,
- c. Mendorong kegiatan investasi yang terkait dengan aspek kelautan guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan devisa dan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau.
- d. Meminimalisasi dampak negatif dari kegiatan eksploitasi laut, pantai dan pesisir untuk menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada dan mempertahankan ekosistem laut, seperti biota laut, terumbu karang dan potensi lainnya.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kelautan (nelayan, instansi terkait dan pelaku kelautan lainnya) dalam mengelola potensi kelautan secara efisien dan efektif.
 - 2) Membuat dan melaksanakan serta penegakan hukum peraturan di bidang kelautan.
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana di bidang kelautan.

- 4) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang kelautan.
 - 5) Peningkatan teknologi di bidang kelautan.
 - 6) Melakukan kegiatan promosi potensi di bidang kelautan untuk menarik investor.
- b. Program Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Kelautan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Melakukan inventarisasi, data base dan kajian potensi kelautan.
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan di bidang kelautan.
 - 3) Melakukan monitoring dan pengawasan serta pengamanan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap potensi kelautan.
 - 4) Melakukan kajian dampak lingkungan di bidang kelautan.

4.1.11 Lingkungan Hidup

1. Isu Strategis

- a. Rusaknya ekosistem akibat dari pembangunan yang tidak berorientasi kepada ramah lingkungan.
- b. Pembangunan yang ada di wilayah Kota Batam yang sebagian belum disertai analisa dampak lingkungan.
- c. Tidak konsistennya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan master plan Barelang.
- d. Kurangnya pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem.
- e. Rusaknya ekosistem akibat eksploitasi pasir baik di darat maupun di laut.
- f. Belum tertatanya sistem pembuangan limbah di wilayah Kota Batam.
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah terhadap pelestarian lingkungan.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan rehabilitasi sumber daya alam berupa hutan, tanah dan air yang rusak melalui pendekatan terpadu dan terkoordinasi.
- b. Meningkatkan pendayagunaan daerah pantai dan daerah laut tanpa harus merusak kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
- c. Mengharuskan pelaksanaan Amdal bagi setiap kegiatan pembangunan yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam baik dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan sosial maupun oleh masyarakat dan pengusaha untuk kepentingan ekonomi, melakukan pengawasan secara konsisten dan berkesinambungan atas berbagai kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Rehabilitasi Lahan Kritis, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan inventarisasi kawasan dan lahan kritis
 - 2) Melaksanakan reboisasi pada kawasan dan lahan kritis.

- b. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan peranan masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pendidikan, penataran dan penyuluhan.
 - 2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektor dan lintas daerah.
 - 3) Melaksanakan pengamanan potensi sumber daya alam baik di darat maupun di laut.
- c. Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Rehabilitasi hutan bakau
 - 2) Melaksanakan pengamanan tebing/tanah yang kritis.
 - 3) Inventarisasi potensi air baku dan pengembangannya.
- d. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencemaran lingkungan hidup.
 - 4) Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui pelaksanaan AMDAL.
 - 5) Melaksanakan pembinaan penyuluhan dan sosialisasi kepada pihak terkait, masyarakat, aparat tentang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- e. Program Pembinaan Daerah Pantai, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Menyusun data base perencanaan daerah pantai, pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 2) Melaksanakan pengamanan dan penyelamatan daerah pantai.

4.1.12 Keuangan dan Kekayaan Daerah

1. Isu Strategis

- a. Belum terujinya kemampuan aparatur pemerintah Kota Batam dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah.
- b. Belum optimalnya upaya pengelolaan sumberdaya keuangan daerah.
- c. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
- d. Belum konsistennya produk-produk hukum dan perundangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- e. Belum lengkapnya Peraturan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
- f. Belum optimalnya penggalian potensi penerimaan daerah.

2. Arah Kebijakan

Peningkatan upaya pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang mampu mendukung kelancaran pembangunan, menjalankan roda pemerintahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Penerimaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah.
 - 2) Menyempurnakan, membuat dan melaksanakan serta mensosialisasikan produk hukum dan penegakannya di bidang keuangan daerah.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi terhadap perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - 4) Pembuatan sistem informasi manajemen keuangan daerah.
 - 5) Meningkatkan kualitas aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 - 6) Meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga pengelolaan keuangan daerah.
 - 7) Sosialisasi dan pelatihan sistem akuntansi keuangan daerah.

- b. Pembinaan Kekayaan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola kekayaan asset daerah.
 - 2) Melakukan inventarisasi terhadap kekayaan asset daerah.
 - 3) Pembuatan sistem informasi manajemen kekayaan asset daerah
 - 4) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan kekayaan asset daerah.
 - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - 6) Menyusun dan mensosialisasikan perangkat hukum di bidang pengelolaan kekayaan daerah.

4.2 Bidang Kesra, Pendidikan & Kebudayaan

4.2.1 Bidang Pendidikan

1. Isu Strategis

- a. Masih rendahnya kualitas pendidikan.
- b. Manajemen pendidikan perlu dibenahi.
- c. Masih terbatasnya infrastruktur dan suprastruktur di bidang pendidikan umum, kejuruan dan luar sekolah.
- d. Masih belum tertampungnya anak usia sekolah.
- e. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam mengelola pendidikan.
- f. Belum adanya keterkaitan dan kesesuaian (link and match) antara produk pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja.
- g. Relatif rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik.
- h. Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat untuk menunjang pendidikan.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas relevansi dan efisiensi pendidikan jalur sekolah pada semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, sekolah menengah hingga perguruan tinggi agar mampu menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat.
- b. Meratakan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan membangun prasarana dan sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah hinterland, sentra-sentra permukiman dan di daerah terpencil serta penduduk miskin.
- c. Mendorong untuk terus tumbuh berkembangnya aktifitas pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga dan masyarakat guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menumbuhkembangkan sikap santun dan budi pekerti tinggi.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun dan mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja, terutama untuk pendidikan kejuruan dan politeknik.
- e. Mendorong berkembangnya pendidikan tinggi yang memenuhi standar akreditasi pemerintah yang responsive terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memenuhi tuntutan perkembangan pasar tenaga kerja.
- f. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pembinaan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
 - 1) Studi dan pelaksanaan pengembangan sekolah kejuruan & sekolah unggulan.
 - 2) Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan peralatan penunjang di bidang pendidikan.
 - 3) Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga-lembaga pendidikan.
 - 4) Penambahan jam dan kegiatan belajar pada bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.
 - 5) Menyusun dan mensosialisasikan perangkat hukum di bidang pendidikan.
 - 6) Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur dan suprastruktur di bidang pendidikan di wilayah perkotaan, hinterland dan wilayah pesisir.
 - 7) Pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan golongan masyarakat yang kurang mampu pada semua strata pendidikan.
 - 8) Memberdayakan peran keluarga dalam bidang pendidikan.
 - 9) Mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan bidang pendidikan.
 - 10) Mendorong peningkatan kinerja perguruan tinggi.
- b. Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik.
- 2) Melakukan rekrutmen tenaga pendidik yang professional.
- 3) Pemberian insentif kepada tenaga pendidik sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
- c. Program Pendidikan Luar Sekolah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Menumbuhkembangkan minat masyarakat terhadap peningkatan pengetahuan melalui jalur luar sekolah.

4.2.2 Kebudayaan

1. Issue Strategis

- a. Belum berkembangnya kualitas kinerja lembaga kebudayaan.
- b. Kurangnya kerjasama antar institusi kebudayaan.
- c. Kurangnya minat generasi muda untuk menghayati dan melestarikan nilai-nilai budaya Melayu.
- d. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelestarian budaya.
- e. Belum tercerminnya khasanah budaya Melayu pada setiap kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

2. Arah Kebijakan

- a. Mengembangkan nilai budaya lokal untuk memperkaya budaya nasional, serta menangkal akses penetrasi budaya asing yang negatif, melalui revitalitas dan apresiasi kebudayaan.
- b. Menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya lokal untuk memperkaya khasanah budaya melayu dan mengembangkan kegiatan kepariwisataan dengan tidak melupakan nilai-nilai moral sebagai bangsa yang religius.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan inventarisasi dan studi terhadap potensi nilai budaya lokal.
 - 2) Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga kebudayaan formal masyarakat.
 - 3) Meningkatkan dukungan fasilitas sarana dan prasarana penunjang bidang kebudayaan.
 - 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola lembaga kebudayaan formal masyarakat.
 - 5) Mendorong minat dan motivasi masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan dan melestarikan nilai-nilai budaya.
- b. Program Pembinaan Kesenian, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pembinaan kegiatan kesenian dan kegiatan budaya.

- 2) Meningkatkan kreatifitas generasi muda dalam kebebasan berkreasi dan berkesenian, sesuai dengan moral, budaya dan agama.
 - 3) Meningkatkan dukungan fasilitas sarana dan prasarana penunjang bidang kesenian.
 - 4) Mendorong minat dan motivasi masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan kesenian.
- c. Program Pembinaan Kebahasaan, Kesusasteraan & Kepustakaan
- 1) Pengembangan dan pembinaan kegiatan kebahasaan, kesusasteraan dan keputakaan.
 - 2) Meningkatkan dukungan fasilitas sarana dan prasarana penunjang bidang kebahasaan, kesusasteraan dan keputakaan.

4.2.3 Pemuda dan Olahraga

1. Isu Strategis

- a. Kurangnya peran dan fungsi organisasi kepemudian dalam pembinaan persatuan dan kesatuan antar pemuda.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan kepemudaan.
- c. Masih banyaknya keterlibatan pemuda dalam masalah kriminalitas dan penyakit masyarakat (Pekat).
- d. Kurangnya perhatian dan pembinaan olahraga dikalangan pemuda.
- e. Kurangnya pembinaan moral spiritual dikalangan pemuda.

2. Arah Kebijakan

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemuda, sebagai potensi sumber daya manusia yang prospektif.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran organisasi kepemudaan untuk mendukung pembangunan.
- c. Membina dan mengembangkan olahraga prestasi dan meningkatkan terus gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan sekolah, kantor maupun permukiman oleh pemerintah maupun masyarakat serta pembangunan stadion yang bertaraf nasional di Kota Batam.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pembinaan Pemuda, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pemuda melalui pembinaan dan pelatihan.
 - 2) Meningkatkan peran serta pemuda dalam kegiatan ilmiah dalam mengembangkan SDM yang berkualitas di kalangan pemuda.
 - 3) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda dalam pembangunan daerah.

- 4) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pemecahan permasalahan sosial kemasyarakatan.
 - 5) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dalam pembinaan dan pengembangan potensi organisasi pemuda.
- b. Program Pembinaan Keolahragaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Melakukan pembinaan pada organisasi keolahragaan dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas olahraga
 - 2) Meningkatkan dukungan fasilitas sarana dan prasarana penunjang keolahragaan dalam rangka peningkatan mutu olahraga.

4.2.4 Kesehatan

1. Isu Strategis

- a. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.
- b. Manajemen kesehatan perlu dibenahi.
- c. Masih terbatasnya infrastruktur dan suprastruktur di bidang kesehatan, terutama di daerah padat penduduk dan daerah Hinterland.
- d. Masih terbatasnya tenaga medis dan paramedis.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan dan sanitasi lingkungan.
- f. Relatif rendahnya kesejahteraan tenaga medis dan para medis.
- g. Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat dalam menjangkau biaya kesehatan.
- h. Belum meratanya pendistribusian tenaga kesehatan.
- i. Tingginya penyebaran penyakit menular, seperti Demam berdarah, Malaria, HIV, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan kesejahteraan lingkungan serta mendorong kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan dan gizi.
- b. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui peningkatan pembangunan dan kemampuan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan tenaga kesehatan dan obat yang murah.
- c. Mendorong berkembangnya upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat secara mandiri melalui program JPKM.
- d. Meningkatkan penyuluhan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS sebagai akibat posisi Kota Batam sebagai kota pariwisata, perdagangan dan industri.

3. Program dan Kegiatan

- a. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat dan obat.

- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal bagi tenaga medis dan para medis.
 - 3) Peningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan para medis.
 - 4) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan daerah dalam pelayanan kesehatan.
 - 5) Pemantapan data base perencanaan di bidang kesehatan.
 - 6) Penambahan tenaga medis dan paramedis.
 - 7) Membuat dan mensosialisasikan perangkat hukum di bidang kesehatan.
 - 8) Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat prasejahtera dan wilayah hinterland/pesisir.
 - 9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sistem manajemen pelayanan kesehatan.
 - 10) Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan kesehatan.
 - 11) Mensosialisasi dan melaksanakan penggerakan Batam sebagai Kota Sehat.
- b. Program Penyuluhan Kesehatan, dengan kegiatan melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat.
 - c. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan kegiatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obat-obatan, peredaran obat dan makanan
 - d. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
 - 2) Melaksanakan tindakan yang bersifat preventif di bidang kesehatan terhadap daerah endemis.
 - 3) Melaksanakan penyuluhan bidang kesehatan dalam rangka pemberantasan penyakit, terutama HIV/AIDS.
 - e. Program Perbaikan Gizi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan peningkatan perbaikan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - 2) Meningkatkan koordinasi dan pengawasan kewaspadaan pangan dan gizi.

4.2.5 Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Isu Strategis

- a. Belum adanya perencanaan tatanan sosial yang relegius.
- b. Tidak adanya keseimbangan pembangunan di semua sektor sosial kemasyarakatan.
- c. Pembangunan ekonomi yang kurang memperhatikan rusaknya moral dan tatanan sosial.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga tingkat kerukunan antar suku dan agama.

- e. Masih adanya gelandangan, pengemis, tunawisma, dan orang gila yang merupakan beban masyarakat.
- f. Kurangnya pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan.
- g. Belum ditanganinya masalah judi dan prostitusi secara komprehensif.
- h. Maraknya pertumbuhan LSM yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan usaha perbaikan kesejahteraan sosial melalui optimallisasi pelayanan sosial dan bantuan sosial serta terus mendorong peningkatan kesadaran, kemampuan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial serta tanggung jawab sosial masyarakat melalui jalinan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.
- c. Menertibkan lokasi-lokasi yang dianggap rawan penyakit masyarakat seperti prostitusi, perjudian dan lain-lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.
- d. Meningkatkan pembinaan organisasi sosial sebagai ujung tombak dalam menggerakkan penanganan masalah sosial terutama pada lapisan bawah.

3. Program dan Kegiatan

- a. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Inventarisasi permasalahan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Menyusun dan mensosialisasikan serta penegakan perangkat hukum di bidang kesejahteraan sosial.
 - 3) Melaksanakan pembinaan dan pendidikan keterampilan dalam memecahkan masalah sosial.
 - 4) Pengawasan dan pengendalian masalah sosial.
 - 5) Melakukan koordinasi lintas sektor dan daerah dalam menanggulangi masalah sosial.
- b. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga sosial kemasyarakatan.
 - 2) Melakukan rehabilitasi terhadap penyandang masalah sosial (wanita tuna susila, pengemis, gelandangan, waria manula/jompo).
 - 3) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial.
- c. Program Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Mendorong kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penanggulangan permasalahan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Meningkatkan peran serta lembaga - lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam menangani permasalahan sosial.
- d. Program Penanggulangan Bencana Alam, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan inventarisasi terhadap daerah rawan bencana alam.
 - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana alam.
 - 3) Pemberian bantuan kepada korban bencana alam.
 - 4) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan penanggulangan bencana alam.

4.2.6 Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Isu Strategis

- a. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan bagi sebagian kaum perempuan.
- b. Masih lemahnya pemberdayaan perempuan yang disebabkan permasalahan structural.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang isu jender.
- d. Belum terkoordinirnya dengan baik organisasi perempuan yang ada di Kota Batam.
- e. Masih rendahnya pengetahuan dan peran serta kaum perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- f. Masih rendahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan.
- g. Masih terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan serta peran aktif perempuan dalam pembangunan.
- b. Mewujudkan keluarga beriman/taqwa, sehat sejahtera dan bahagia dalam masyarakat.
- c. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program Peranan Wanita, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pemberdayaan perempuan.
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk pemberdayaan perempuan.
- 3) Melaksanakan pembinaan terhadap wanita beserta organisasi dan lembaganya.
- 4) Melakukan pembinaan dan penyuluhan bagi kaum perempuan dalam mewujudkan keluarga sehat jasmani dan rohani.
- 5) Mengembangkan hak perempuan dibidang ekonomi, budaya, sosial dan politik.

4.2.7 Kependudukan dan Keluarga Berencana

1. Isu Strategis

- a. Pertumbuhan dan pertambahan penduduk yang sangat tinggi akibat urbanisasi dan migrasi.
- b. Penyebaran penduduk yang tidak merata.
- c. Belum adanya perencanaan kependudukan yang komprehensif.
- d. Belum adanya sistem informasi dan data base di bidang kependudukan.
- e. Masih rendahnya kualitas hidup bagi sebagian penduduk.
Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program pengendalian kependudukan.
- f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya melaksanakan program KB.

2. Arah Kebijakan

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Batam, melalui Keluarga Berencana (KB) mandiri, menurunkan angka kematian balita, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta penduduk usia lanjut.
- b. Mengendalikan arus migrasi penduduk masuk ke Kota Batam, melalui pelaksanaan dan penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan inventarisasi terhadap keluarga prasejahtera dan sejahtera dalam rangka program keluarga berencana.
 - 2) Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan KB serta kesehatan reproduksi.
 - 3) Melaksanakan pengembangan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakat pedesaan.
 - 4) Peningkatan peranan pos yandu.
 - 5) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam program keluarga berencana.
 - 6) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang program keluarga berencana terutama untuk keluarga kurang mampu.
- b. Program Kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan pengendalian penduduk.
 - 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola program pengendalian penduduk.
 - 3) Peningkatan mutu dan tertib administrasi kependudukan.
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pengendalian penduduk.
 - 5) Menyusun, mensosialisasikan dan melaksanakan peraturan di bidang kependudukan.

4.2.8 Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Issue Strategis

- a. Belum tertatanya dengan baik tata kota, yang mengakibatkan kemacetan, kesemrawutan dan banjir pada beberapa wilayah.
- b. Timbulnya Pemukiman yang kumuh akibat dari dibangunnya pemukiman bermasalah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat, usaha swasta dan pemerintah untuk peningkatan penyediaan perumahan, termasuk sarana dan prasarannya.

- d. Masih belum terselenggaranya dengan baik mengenai masalah penataan bangunan dan kawasan khusus.
- e. Kurang berkembangnya kawasan dan lingkungan pemukiman pedesaan dan hinterland.
- f. Lemahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan tata kota
- g. Sulitnya memperoleh bahan baku bangunan dan mahalnnya harga, karena dipengaruhi oleh nilai valuta asing.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan perbaikan perumahan dan pemukiman dengan program perbaikan kawasan permukiman kumuh.
- b. Menyelesaikan masalah “ruli” yang terus berkembang melalui pendekatan persuasif tanpa meninggalkan hukum yang berlaku.
- c. Mendorong berkembangnya pengembang yang melakukan pembangunan perumahan sederhana untuk kelompok berpenghasilan rendah, melalui penyediaan KSB, subsidi lahan serta program-program lain yang sejenis.
- d. Meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan kembali permukiman melalui perubahan peruntukkan dan pembangunan fasilitas sosial/umum di kawasan yang sudah menjadi permukiman yang padat dan kumuh.
- e. Mengembangkan kawasan dan lingkungan pemukiman pedesaan dan Hinterland.
- f. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat di lingkungan permukiman bermasalah.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan bantuan perbaikan perumahan dan permukiman secara gradual terutama di kawasan hinterland dan pesisir/pantai.
 - 2) Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya perbaikan perumahan dan permukiman.
- b. Program Penataan Bangunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kualitas SDM di bidang penataan bangunan.
 - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam program penataan bangunan.
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pengaturan dan pengawasan bahan bangunan.
 - 4) Menyusun dan mensosialisasikan serta penegakan perangkat hukum di bidang penataan bangunan.
- c. Program Penyediaan Perumahan dan Permukiman, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan pengelolaan dan penertiban kawasan perumahan dan permukiman.
 - 2) Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap institusi pengelola penyedia perumahan dan permukiman.

- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan perumahan sederhana dan Kawasan Siap Bangun bagi tenaga kerja dan masyarakat kurang mampu.
 - 4) Merelokasikan secara gradual perumahan dan pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya terutama di daerah hinterland dan kawasan perkotaan rawan lingkungan.
 - 5) Peningkatan pembangunan Fasos dan Fasum yang memenuhi persyaratan pada kawasan-kawasan perumahan dan permukiman.
 - 6) Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman agar sesuai dengan RTRWK Batam.
- d. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan dan pengelolaan air bersih.
 - 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan air bersih.
 - 3) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan instalasi air bersih.
 - 4) Penyediaan sumber air baku dan perluasan jaringan pelayanan.
 - 5) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan air bersih.
 - 6) Melakukan pengawasan pengelolaan air bersih.
- e. Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penataan dan penyehatan lingkungan perumahan dan pemukiman.
 - 2) Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana penunjang penyehatan lingkungan di kawasan perkotaan dan wilayah hinterland/pesisir.
 - 3) Perencanaan dan pembangunan sistem jaringan penyehatan lingkungan.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam program penyehatan lingkungan.

4.3 Bidang Keagamaan

1. Isu Strategis

- a. Kurangnya kualitas manajemen dan kinerja pegawai lembaga agama dalam kegiatan keagamaan.
- b. Kurangnya peran lembaga agama dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan agama.
- c. Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan keagamaan.
- d. Kurang berkembangnya wadah ekonomi yang berbasis keagamaan.
- e. Kurangnya jam pelajaran keagamaan dan tenaga pengajar pada setiap jenjang pendidikan formal.
- f. Belum meratanya kegiatan syiar keagamaan dalam rangka meningkatkan budi pekerti bagi masyarakat.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan pembinaan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Meningkatkan peran lembaga - lembaga keagamaan serta pemuka-pemuka agama dalam berbagai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran serta umat beragama dalam pembangunan di Kota Batam.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pembinaan Pendidikan Agama Tingkat Dasar, Menengah dan Tinggi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Mendorong peningkatan dan pengembangan pendidikan agama dan budi pekerti pada setiap tingkat pendidikan formal.
 - 2) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas bimbingan rohani dan ceramah keagamaan.
- b. Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama, dengan kegiatan Mendorong peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.
- c. Program Pembinaan Kelembagaan dan Tenaga Penyuluh Keagamaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Membantu dan mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah di bidang agama, juru penerang agama dan lembaga keagamaan.
 - 2) Mendorong lembaga keagamaan agar proaktif melakukan dan memperluas pelayanan agama kepada masyarakat.
 - 3) Pemberdayaan potensi kelembagaan di bidang keagamaan (zakat, infaq, sadaqah, BMT dan sejenisnya).
- d. Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Membantu pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama.
 - 2) Penertiban status administrasi dan penggunaan sarana dan prasarana kehidupan beragama.

4.4 Bidang IPTEK

1. Isu strategis

- a. Masih kurangnya lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan potensi Kota Batam.
- b. Adanya ketimpangan kemampuan IPTEK antara SDM lokal dengan SDM asing.
- c. Kurangnya alokasi dana yang dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan IPTEK.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap penelitian, pengembangan dan pemanfaatan Iptek.
- e. Belum terealisasinya alih tekhnologi dari perusahaan asing kepada tenaga kerja lokal.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semua aspek pembangunan, terutama di bidang industri dan komunikasi.
- b. Mengupayakan penyebaran dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung pembangunan sektor industri dan pertanian terutama yang dilaksanakan masyarakat pedesaan di daerah hinterland.
- c. Meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung penguatan dan pendalaman struktur industri.
- d. Meningkatkan sistem informasi daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi secara tepat dan terpadu serta pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pembangunan.
- e. Mengusahakan pendirian lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang relevan dengan tuntutan pembangunan seperti antara lain politeknik bidang industri, informasi, pertanian serta bidang-bidang lainnya.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Penguasaan Teknologi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semua aspek pembangunan.
 - 2) Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga yang dapat memberikan informasi bermuatan IPTEK.
 - 3) Peningkatan penyuluhan dan bimbingan teknologi tepat guna kepada masyarakat.
- b. Program Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hankam serta Bidang Hukum, dengan kegiatan meningkatkan pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hankam dan bidang umum dalam rangka pemantapan data perencanaan pembangunan di Kota Batam.
- c. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik, dengan kegiatan peningkatan penyediaan dan penyempurnaan data-data statistik dan data base pembangunan.
- d. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemberian kesempatan kepada para peneliti, pendidik dan partisi di bidang IPTEK.
 - 2) Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan tinggi kejuruan sesuai dengan kebutuhan di Kota Batam.
 - 3) Peningkatan kerjasama antar lembaga IPTEK melalui Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri.
 - 4) Melaksanakan pembuatan implementasi sistem manajemen Pemko Batam.

4.4 Bidang Hukum

1. Isu Strategis

- a. Kurang pedulinya masyarakat terhadap aturan hukum.
- b. Lamban dan kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang benar dan adil.
- c. Kurangnya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara terpadu oleh instansi terkait.
- d. Kurang tegasnya sanksi hukum terhadap sebagian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
- e. Belum terselenggaranya pemahaman HAM yang universal bagi seluruh lapisan masyarakat.
- f. Masih rendahnya penghayatan hukum agama dan norma-norma budaya.
- g. Kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melalui jalur hukum, tetapi melalui pengadilan massa.
- h. Masih belum lengkapnya peraturan daerah dan peraturan penunjang lainnya.
- i. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan penegakan hukum.

2. Arah dan Kebijakan

- a. Melaksanakan penegakan hukum, peraturan dan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dalam rangka menumbuhkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Mewujudkan penegakan hukum melalui pembangunan fondasi sosial dan pembelajaran politik yang sehat dan bermoral.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat melalui pelaksanaan penyuluhan hukum serta penegakan hukum yang diikuti oleh sanksi-sanksi tegas bagi yang melanggar.
- d. Meningkatkan sarana, prasarana dan kesejahteraan penegak hukum sesuai dengan kebutuhan.
- e. Meningkatkan pembinaan, dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan hukum secara konsekwen.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Penerapan dan Penegakan Hukum, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan kegiatan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelanggaran hukum secara terpadu dan berkelanjutan.
 - 2) Mendorong lembaga peradilan dalam penerapan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) Menyusun dan menyiapkan aturan dan ketentuan daerah dalam menunjang penegakan hukum.

- b. Program Pembinaan Peradilan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Mendorong peningkatan pengkaderan aparat penegak hukum.
 - 2) Mendorong penataan dan pembinaan aparat dan lembaga peradilan.
- c. Program Penyuluhan Hukum, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan kegiatan sosialisasi perangkat hukum daerah dan penyuluhan hukum bagi masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.
 - 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menegakan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum, dengan kegiatan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan hukum.

4.6 Bidang Aparatur, Politik, Penerangan dan Media Massa

1. Isu Strategis

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas tugas dibidang aparatur, politik, penerangan dan media massa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- b. Masih belum meratanya jangkauan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dibidang aparatur, politik, penerangan dan media massa.
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada Good Governance.
- d. Belum terlaksananya dengan baik pembinaan politik, guna terwujudnya kehidupan demokrasi.
- e. Kurangnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, politik, penerangan dan media masa.
- f. Masih lemahnya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan dalam pembangunan.
- g. Kurangnya SDM aparatur pemerintah baik secara kuantitas maupun kualitas, untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat
- h. Belum sepenuhnya Pemerintah Pusat menyerahkan hak Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Arah dan Kebijakan

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan aparatur agar mampu melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
- b. Mengusahakan peningkatan sarana, prasarana serta kesejahteraan aparatur.
- c. Mengupayakan peningkatan penertiban dan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien dan berwibawa.
- d. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berorganisasi politik agar lebih mandiri serta berbudaya politik yang sesuai dengan jiwa, semangat dan ideologi bangsa.

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- f. Menciptakan suasana kehidupan yang demokratis guna menunjang peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas kehidupan.
- g. Meningkatkan kegiatan informasi, komunikasi dan media massa dalam mengarahkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- h. Meningkatkan pendayagunaan media informasi untuk kepentingan pembangunan dan pembina masyarakat.
- i. Meningkatkan jangkauan pelayanan informasi dan komunikasi massa.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Fungsional, dengan kegiatan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tekhnis fungsional bagi aparatur.
- b. Program Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi aparatur.
 - 2) Melaksanakan pendidikan kedinasan bagi aparatur.
- c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Pemerintah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana aparatur pemerintah.
 - 2) Peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintah.
- d. Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Memantapkan sistem pendataan aparatur pemerintah.
 - 2) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi.
 - 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur di bidang pengawasan dan pengendalian.
 - 4) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan penertiban dan pengawasan.
 - 5) Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemko.
 - 6) Menyusun dan menyempurnakan produk hukum di bidang pelaksanaan pembangunan.
 - 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan melalui dialog dan media lainnya.
- e. Program Pembinaan Politik, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Pemberdayaan Politik Masyarakat dan Orsospol.
 - 2) Melakukan pembinaan dan meningkatkan peran Orsospol, LSM dan Ormas lainnya serta tenaga kerja asing.
 - 3) Pemberdayaan aparatur dalam rangka pembinaan politik masyarakat dan orsospol.

- f. Program Pengembangan Operasi Penerangan, dengan kegiatan antara lain :
 - 1) Membentuk pusat data informasi.
 - 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen di bidang penerangan dan kehumasan.
 - 3) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan institusi berbasis masyarakat dalam menciptakan suasana kehidupan yang demokratis.
 - 4) Melakukan publikasi, dokumentasi dan informasi pembangunan.
- g. Program Pengembangan Radio, Televisi dan Film, dengan kegiatan melakukan pembinaan terhadap pengembangan Radio, Televisi dan Film.
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Pers, dengan kegiatan melakukan pembinaan terhadap pengembangan pers.
- i. Program Peningkatan Sarana Penerangan, dengan kegiatan mengadakan sarana dan prasarana penunjang bagi penerangan masyarakat.

4.7 Bidang Keamanan dan Ketertiban

1. Isu Strategis

- a. Belum optimalnya pembinaan keamanan, guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Masih adanya oknum aparat keamanan yang belum mengikuti prinsip-prinsip reformasi dalam tubuh Polri dan TNI.
- c. Masih rendahnya ratio aparat dengan jumlah masyarakat yang dilayani.
- d. Tingginya angka kriminalitas yang tidak dapat diatasi secara tuntas oleh pihak keamanan.
- e. Maraknya praktek percaloan dan premanisme yang sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan sering menjadi pemicu kerusuhan antar etnis.
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban umum.
- g. Kurangnya jumlah personil dan kualitas peranan satpol PP yang menjadi ujung tombak bagi penegakan ketentraman dan ketertiban.
- h. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang ketertiban dan keamanan.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan ketentraman ketertiban masyarakat.
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dengan cara meningkatkan efektifitas kerja aparat kamtibmas.
- c. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan setiap masalah ketertiban dan keamanan.

- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah ketertiban dan keamanan, dalam kerangka pengamanan swakarsa dan keamanan lingkungan.
- e. Aparat keamanan bersama-sama dengan masyarakat ikut mengawasi dan mengamankan potensi sumber daya alam dan asset daerah untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang ketertiban.
 - 2) Mendorong dan membantu TNI/Polri dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.
 - 3) Penambahan personil aparat khususnya satpol Pamong Praja yang terlatih.
 - 4) Peningkatan koordinasi dan partisipasi unsur-unsur PAM Swakarsa, ormas dan organisasi lainnya dengan aparat keamanan (TNI/Polri).
- b. Program Pembinaan Masyarakat dan Kekuatan Sosial Politik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pembinaan dan pelatihan masyarakat di bidang ketertiban lingkungan masyarakat.
 - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang ketertiban.
- c. Program Peningkatan Penanggulangan Pengaruh Negatif, dengan kegiatan memberikan dukungan dalam pemberantasan kegiatan praktek percaloan dan premanisme serta penggunaan narkoba yang sangat meresahkan masyarakat.

4.8 Bidang Pembangunan Daerah

4.8.1 Pembangunan Daerah

1. Isu Strategis

- a. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi terhadap program-program yang dilaksanakan dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Rendahnya kapasitas lembaga pemerintah daerah, lembaga desa, organisasi masyarakat dan lembaga ekonomi masyarakat.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Melaksanakan dan menerapkan mekanisme perencanaan pembangunan Kota.
- c. Mengupayakan peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah, lembaga desa, organisasi masyarakat dan lembaga ekonomi masyarakat

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

- a. Program Pembangunan Daerah Tingkat II, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Memantapkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan kapasitas daerah.
 - 3) Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah, lembaga desa, organisasi masyarakat dan lembaga ekonomi masyarakat.

3.3.2 Penataan Ruang

1. Isu Strategis

- a. Belum adanya penataan detail ruang pada wilayah hinterland Kota Batam.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan sistem pengelolaan rencana tata ruang
- b. Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Menata dan mengembangkan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, khususnya untuk wilayah hinterland.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program Penataan Ruang, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembuatan GIS RTRW Kota Batam.
- b. Penyusunan rencana detail pemanfaatan ruang kawasan atau zoning (penataan kawasan) wilayah kota dan hinterland.
- c. Penyusunan peraturan/pedoman/standar pemanfaatan ruang.
- d. Melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan ketataruangan.
- e. Menyusun dan mensosialisasikan perangkat hukum di bidang penataan ruang.